

**EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBERDAYAAN DESA DI DESA TEBING TANJUNG SELAMAT
KECAMATAN PADANG TUALANG**

SKRIPSI

Oleh:

TASYA ANGGRAINI

1403100047

**Program Study Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

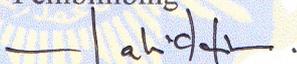
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Lengkap : **TASYA ANGGRAINI**
N P M : 1403100047
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN DESA DALAM MENINGKATAKAN PEMBERDAYAAN DESA DI DESA TEBING TANJUNG SELAMAT KECAMATAN PADANG TUALANG**

Medan, 22 Maret 2018

Pembimbing



MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP

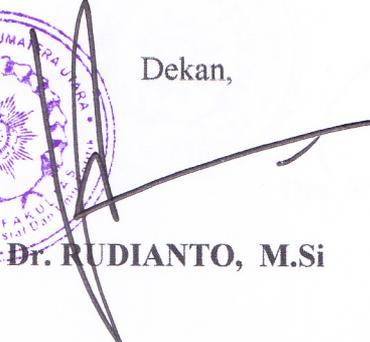
Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd



Dekan,


Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **TASYA ANGGRAINI**
N P M : 1403100047
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, tanggal : Kamis, 22 Maret 2018
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

(.....
.....)

PENGUJI II : **SYAFRUDDIN, S.Sos, MH**

(.....
.....)

PENGUJI III : **MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP**

(.....
.....)

PANITIA UJIAN

Ketua,

Dr. RUDIANTO, M.Si



Sekretaris,

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Tasya Anggraini, NPM 1403100047, menyatakan bahwa sungguh-sungguh:

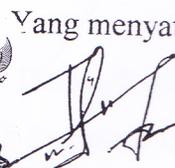
1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh Undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulis saya sendiri, bukan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya inni dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan


Tasya Anggraini


METERAI
TEMPEL
TGL 20
DFAEDAEF964082153
6000
ENAM RIBU RUPIAH

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kabar kepada manusia bahwa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Administrasi Negara:Administrasi Pembangunan).

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Terutama kepada yang teristimewa Orang Tua, Ayahanda tersayang Noto Kuswoyo dan Ibunda tercinta Yandrayani Harapan sebagai orang Tua yang sangat berjasa dalam segala hal dari saat penulisan di dalam kandungan hingga saat ini dan saudaraku Putri Aura Salsa Bila yang selalu memberikan semangat disaat penulisan menyelesaikan skripsi ini.

Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala keindahan hati mengucapkan terimakasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, kepada yang terhormat:

1. Kepada Bapak Dr. Agussani., M..AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Drs. Tasrif Syam., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Kepada Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
4. Kepada Bapak Mujahidin S.sos., M.Sp selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terimakasih atas materi kuliah yang telah diberikan selama ini.
6. Seluruh pegawai dan keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah memberi dukungn dan semangat demi terselesaikanya skripsi ini.
7. Kepada Bapak Sukisno selaku Kepala Desa di Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang.
8. Kepada sahabatku Karminem, Devi Andriani, Monica Chindy Widiya dan Dian Juwita. Terima kasi atas waktu dan kenangan yang tak akan hapus oleh waktu.
9. Kepada teman-teman seperjuangan mulai dari kuliah samapi akhir Riska amalia, Musria, Ardian Dirga, Asri Farhizal, Rofik Indra Lesmana, irfan Efendi, Rohani, Evi Mandasari. Semoga kita bisa menjadi orang berguna dimasa depan.
10. Kepada teman-teman ku tersayang Ike Pertama Putri, Putri Nindy Elisa Rambe terima kasi atas montivasinya.
11. Kepada Muhammad Tuah Suheri S.T terima kasi yang selalu memberi semangat serta motivasinya, sehat selalu ya.
12. Kepada seluruh angkatan 2014 Mahasiswa IAN FISIP UMSU, semoga kita tetap menjaga silaturahmi yang baik.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupaun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasi sebanyak-banyaknya semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah

SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis skripsi ini, semoga akan leih baik lagi kedepannya.

Medan, Maret 2018

Penulis

Tasya Anggraini

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN DESA DI DESA TEBING TANJUNG SELAMAT KECAMATAN PADANG TUALANG

TASYA ANGGRAINI

NPM 1403100047

Pendamping desa merupakan salah satu kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari dan oleh untuk anggota kelompok serta mengembangkan solidaritas dalam rangka meningkatkan pemberdayaan desa dan kesadaran sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Widjaja (2003:169) pemberdayaan desa merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pendampingan desa dalam meningkatkan pemberdayaan desa didesa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendampingan desa didesa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dan informan penelitian yang terdiri atas 9 orang, maka dalam penelitian ini akan mewawancarai 9 orang informan penelitian yang terdiri atas; 1 orang pendamping desa yaitu Bapak Eka Prayoga, 1 orang pemerintah desa yaitu Bapak Purcnnawarman, 1 orang tokoh pemuda, 1 orang tokoh agama, dan 5 orang masyarakat.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendampingan desa dalam meningkatkan pemberdayaan desa didesa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang. Telah sesuai dengan peraturan menteri desa Pasal 3 Tahun 2015 yaitu tentang pendampingan masyarakat desa yang dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Sehingga dengan adanya pendamping desa didesa ini dapat membantu dalam peningkatan pemberdayaan maupun dalam peningkatan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini disebabkan karena dengan adanya keberadaan pendamping desa sudah berjalan dengan baik. Untuk melakukan tindakan pemberdayaan desa melalui s, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas desa. Misi besar pendampingan desa adalah untuk memberdayakan masyarakat desa menjadi lebih maju, mandiri dan demokratis. Sehingga dengan adanya pendamping desa dapat mencapai sasaran yaitu untuk kesejahteraan masyarakat desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang.

Kata Kunci: Pendamping Desa, Pemberdayaan masyarakat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Efektivitas.....	6
1. Pengertian Efektivitas.....	6
2. Ukuran Efektivitas.....	8
3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas.....	10
B. Konsep Pendamping Desa.....	10
1. Pengertian Pendamping Desa.....	10
2. Tugas Dan Fungsi Pendamping desa.....	12
C. Tujuan Pendamping Desa.....	13

D. Aturan Tentang Pendamping Desa.....	14
E. Pemberdayaan Desa.....	15
1. Pengertian Pemberdayaan Desa.....	15
2. Proses Pemberdayaan desa.....	17
F. Konsep Pengertian Desa.....	19
1. Pengertian Desa.....	19
2. Pengertian Pemerintah Desa.....	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	21
B. Kerangka Konsep.....	21
C. Defenisi Konsep.....	22
D. Kategorisasi.....	23
E. Informan.....	25
F. Teknik Pengumpulan Data.....	25
G. Teknik Analisi Data.....	26
H. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	54
B. Hasil Penelitian.....	55
C. Pembahasan.....	69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan75

Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian.....	24
Tabel 3.2 Sejarah Kejadian Baik dan Buruk.....	31
Tabel 3.3 Mata Pencarian Penduduk.....	34
Tabel 3.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Agama..	36
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	38
Tabel 3.6 Data Pendidikan.....	39
Tabel 3.7 Jumlah Masjid dan Musholah.....	40

DAFTAR GAMBAR

Bagan Kerangka Konsep.....	24
Bagan 3.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	42
Gambar 7.1 Teknik Analisi Data.....	27.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: Dafrat Riwayat Hidup
LAMPIRAN II	: Daftar Wawancara
LAMPIRAN III	: SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
LAMPIRAN IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
LAMPIRAN V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
LAMPIRAN VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal
LAMPIRAN VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan
LAMPIRAN VIII	: Surat Pengantar Izin Penelitian
LAMPIRAN IX	: Surat Keterangan Penelitian Oleh Kantor Desa Tebing Tanjung Selamat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendampingan desa merupakan seseorang yang berupaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam pendampingan desa di Desa Tebing Tanjung Selamat dan melakukan pemberdayaan masyarakat haruslah didampingi oleh pendamping desa yang dimana tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dan mampu mendampingi desa .

Pendamping desa tersebut haruslah dapat menjadi seorang pendamping desa yang memegang teguh tujuan utama yaitu memberdayakan masyarakat sesuai dengan bidang yang ditanganinya dan mampu berkomunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Artinya butuh ketuan kesabaran dalam mendampingi desa. Misalnya pendampingan harus mampu memberikan pengaruh kuat terhadap kemajuan suatu desa yang berada di kecamatan Padang Tualang.

UU desa diyakini sebagai gerbang harapan menuju kehidupan berdesa yang lebih maju. Sebagai dasar hukum bagi keberadaan desa, UU desa mengontruksikan cara pandang baru praktis berdesa (pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa). Desa dikukuhkan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam arti lainya dapat dikatakan bahwa

saat ini desa tebing tanjung selamat membangun yang artinya desa diharapkan mampu mengatur dirinya sendiri.

Pembangunan desa sebagai sistem yang dikonstruksikan UU desa, menempatkan masyarakat pada posisi strategis, yaitu sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran strategis dalam tata kelolah desa termasuk didalamnya penyelenggaraan pembangunan desa. Isu penting dalam konteks ini adalah peningkatkan keberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya desa yang efektif untuk mewujudkan tata kelolah desa yang baik dan penyelenggaraan pembangunan yang sesuai dan memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam kerangka itulah, pemerintah menetapkan kebijakan menetapkan pendampingan sebagaimana tercantum pada pasal 2 peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Tahun 2015, yang bertujuan :

- Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa
- Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif
- Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sector
- Meningkatkan aset lokal desa

Dengan demikian pendampingan desa di Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang yang dimaksud dapat berhubungan secara intensif dengan pemerintah dan masyarakat desa, menjadi actor yang strategis menuju implementasi UU desa secara optimal. Pendampingan desa adalah kegiatan untuk

melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas desa. Misi besar pendampinga desa adalah pemberdayaan masyarakat desa menjadi maju kuat, mandiri dan demokratis. Kegiatan pendampingan membentang dari pembangunan kapasitas pemerintah, mengorganisasi dan membangun kesadaran kritis masyarakat. Selain itu juga memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokratis hingga mengisi kekosongan antara pemerintah dan masyarakat. Intinya pendampinga desa adalah menciptakan semua frekuensi yang sama antara pendamping dengan yang didampingi.

Maka hadirilah peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi No. 3 Tahun 2015 pendampingan yang membahas mengenai pendampingan desa termasuk di dalamnya mengenai pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus utama pendamping desa.

Oleh karena itu para pendamping desa harus mampu memahami apa yang terjadi tujuan dari pendampingan mereka harus mampu memahami apa yang menjadi amanat dalam Undang-Undang desa agar fungsi pendampingan dapat berjalan secara maksimal dan memenuhi target yang diharapkan pemerintah serta masyarakat.

Oleh karena itu demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan di desa Tebing Tanjung Selamat dan agar berjalan efektif dan efisien, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul : **“Efektivitas Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Desa Di Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan sehingga peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, maka penulis harus merumuskan masalahnya.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pendampingan desa dalam meningkatkan pemberdayaan desa di desa tebing tanjung selamat kecamatan padang tualang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam setiap penelitian agar penelitian tersebut memiliki arah yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapatkan hasil yang sebagaimana diinginkan.

Berdasarkan rumusan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pendampingan desa dalam meningkatkan pemberdayaan desa di Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang.

2. Manfaat Penelitian

Adapaun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara akedemis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Administrasi Negara serta bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan keilmuan, pengetahuan dan sebagai suatu masukan yang positif bagi aparat desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang.

- c. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang positif bagi kajian ilmu pengetahuan tentang pembangunan desa di Indonesia khususnya pada pelaksanaan pendampingan desa dalam meningkatkan pemberdayaan desa di Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang.

D. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini berisikan dan menguraikan teori tentang konsep efektivitas, konsep Pedampingan Desa dan Pemberdayaan Desa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, definisi konsep, kategorisasi, kerangka konsep, teknik penentuan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini memuat tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Mathis dan Jackson (2001:106), Efektivitas didefinisikan sebagai merancang dan mengimplementasikan sekelompok kebijakan dan praktik dan menjamin kesuksesan bahwa sumber daya manusia memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan. Efektivitas memiliki empat sifat utama bagi organisasi, antara lain: (a) berorientasi pada kondisi ekonomi secara menyeluruh dan bersifat umum untuk daerah tertentu; (b) menjamin terhadap perkembangan industri dan pertumbuhan sehingga dapat melahirkan suatu pola tertentu dalam kenyataan; (c) menentukan tindakan tertentu bagi pemerintah dalam menjalankan program; (d) mengikutsertakan masyarakat sehingga masyarakat merasa dirinya memiliki kepentingan.

Menurut Siagian (2008:20), efektivitas memiliki keterkaitan terhadap penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Maka efektivitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan. Dari pengertian di atas terdapat empat hal yang terlihat dari efektivitas yaitu pencapaian tujuan, ketetapan waktu, manfaat dan hasil.

Pelaksanaan kegiatan selalu memakai lima macam sumber usaha, yaitu pikiran, tenaga, waktu, uang dan benda. Walaupun dalam gabungan yang berbeda untuk masing-masing jenis kegiatan, namun pada umumnya setiap masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan tertentu menginginkan hasil yang maksimal. Efektivitas adalah pencapaian tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sasaran dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tetap pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketetapan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. (Abdurahmat, 2008:7).

Waluyo (2007:91), Efektivitas selalu ditekankan kepada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang berubah secara berhasil, merupakan ciri utama organisasi yang efektif. Jika demikian halnya, maka efektivitas dalam organisasi birokrasi dapat dilihat pula bagaimana birokrasi itu merespon berbagai tuntutan lingkungan masyarakat yang menginginkan kecepatan dan ketetapan dalam melaksanakan pelayanan publik atau dalam perkataan lain, birokrasi itu dituntut untuk lebih berorientasi kepada tuntutan pengguna jasa publik.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seseorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P.Siagian (2007:77), yaitu:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu mengetahui tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan organisasi dimasa depan.
- e) Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksana kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f) Tersedianya saran dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai tujuan dan sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Pendapat para ahli diatas dapat dijelaskan, bahwa efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditentukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat.

3. Faktor yang mempengaruhi efektivitas

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Adanya tujuan yang jelas
2. Struktur organisasi
3. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan organisasi adalah memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Struktur dapat mempengaruhi efektivitas dikarenakan struktur yang menjalankan organisasi. Selanjutnya tanpa adanya dukungan partisipasi serta sistem nilai yang akan sulit untuk mewujudkan organisasi yang efektif.

Winardi (2001:75), menyatakan efektivitas dapat dilakukan dengan menspesifikasikan sarana untuk seluruh organisasi, dan individu serta kelompok-kelompok pada organisasi perlu koordinasi.

B. Konsep Pendampingan Desa

1. Pengertian pendampingan desa

Pendampingan desa adalah seseorang yang berupaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan

sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Sedangkan menurut pasal 1 angka (13) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PermenDesaPDTTRANS) Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa, pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas desa.

Pendampingan desa bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka memenuhi kebutuhan dan pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri.

Pendampingan desa juga bertugas mendampingi warga desa meningkatkan daya tawar dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan rakyat desa sehingga program dan kegiatan pembangunan mampu dikelola masyarakat desa itu sendiri.

Pendampingan desa dilakukan oleh pendamping yang terdiri atas :

- a. Tenaga pendamping profesional (pendampingan desa berkedudukan di kecamatan, pendamping teknis berkedudukan dikabupaten, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat berkedudukan dipusat dan diprovinsi)
- b. Kader pemberdayaan masyarakat desa (kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin dan kelompok-

kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa).

- c. Pihak ketiga (Lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan).

2. Tugas dan Fungsi Pendampingan Desa

Adapun tugas mendampingi desa dalam meningkatkan pemberdayaan desa, pendamping desa sendiri dibagi dalam tiga kategori yang terdiri dari tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan atau pihak ketiga.

Tugas - tugas tersebut di uraikan sebagai berikut :

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan desa dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, penyandungan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakatan desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
5. Melakukan koordinasi pendampingan ditingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Fungsi-fungsi Pendamping Desa sebagai berikut :

1. Fasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokasi bersekala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul.
2. Fasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan desa yang disusun secara partisipatif dan demokratis
3. Fasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin desa untuk mewujudkan kepemimpinan desa yang visioner, demokratis dan berpihak kepada kepada kepentingan masyarakat desa.
4. Fasilitasi demokratisasi desa
5. Fasilitasi kaderisasi desa

Bedasarkan pasal 3 peraturan menteri desa pembangunan tertinggal dan transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015, pendampingan masyarakat desa dilaksanaka secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Pendamping desa, bukan pengelola proyek pembangunan didesa. Kerja pendamping desa di fokuskan pada upaya memeberdayakan masyarakat desa melalui proses belajar sosial. Dengan demikian, pendampingan desa tidak dibebani dengan tugas-tugas pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan desa yang berdasarkan undang-undang desa sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah desa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh dan untuk anggota kelompok serta mengembangkan solidaritas dalam rangka meningkatkan

pemberdayaan desa dan kesadaran sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Tujuan Pendampingan Desa

Bila kembali pada inti pengertian pendampingan desa yaitu terjadinya proses kreatif yang oleh masyarakat sendiri, jelas menunjukkan adanya proses inisiatif dan bentuk tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, tanpa adanya intervensi dari luar.

Demikian Tujuan pendamping desa dalam peraturan pasal 2 meliputi: (a) meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa: (b) meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif: (c) meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor dan mengoptimalkan aset lokasi desa secara emansipatoris.

Dengan adanya tujuan dari pendamping desa ini diharapkan setiap masyarakat desa khususnya di Desa Tebing Tanjung Selamat dapat memahami arti penting dengan adanya pendamping desa untuk meningkatkan pemberdayaan desa daya tawar dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan masyarakat desa sehingga program dan kegiatan pembangunan mampu dikelola masyarakat desa itu sendiri.

D. Aturan tentang pendamping desa

Adapun isi dari peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 pada pasal 3 ruang lingkup pendampingan desa meliputi :

- a. Pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa.
- b. Pendampingan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi
- c. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

E. Pemberdayaan Desa

1. Pengertian Pemberdayaan desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemudian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan desa juga merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari perangka kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapatkan awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai

kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa Inggris.

Menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut.

Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan minat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat di pedesaan. Di samping itu, banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat di pedesaan.

Kegagalan usaha tersebut dikarenakan pendekatan utama dalam pembangunan yang dilaksanakan justru memang tidak dilakukan pada masyarakat yang marginal dan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan yang tidak memerhatikan semua aspek dari pembangunan adalah perencanaan yang bersifat dari atas kebawah (top down planning). Dimana pendekatan seperti itu hanya menjadikan masyarakat sasaran pembangunan (objek) bukan pelaku pembangunan (subjek).

Mengingat dan menyadari adanya hambatan dan kegagalan pendekatan dan pembangunan yang bersifat cetak biru (blue print). Maka perlu suatu alternatif paradigma pembangunan yang baru, pendekatan ini didasarkan pada pengalaman desa-desa yang masyarakatnya bekerja secara efektif dalam mengelola sumber daya yang ada di desa tersebut dan lingkungannya.

Potensi yang perlu dikembangkan dan diberdayakan adalah kelembagaan. Kelembagaan yang ada di desa tidak perlu diseragamkan pada setiap desa. Suatu hal yang penting bahwa lembaga sosial merupakan wadah aspirasi masyarakat yang menjadi pendorong dinamika masyarakat desa. Lembaga-lembaga sosial yang diharapkan tumbuh dan berakar dari bawah dan berkembang sesuai dengan budaya (adat istiadat setempat termasuk didalamnya bagaimana mengelola lembaga-lembaga desa (grassroot). Dengan demikian, penguatan kelembagaan sangat menentukan untuk menuju desa.

2. Proses Pemberdayaan Desa

Sebagaimana sudah disinggung dalam uraian sebelumnya, unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian wewenang dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga belum optimal. Masyarakat berada pada posisi marginal disebabkan karena kurang memiliki kedua unsur tadi, kewenangan dan kapasitas. Kondisi tersebut sering juga disebut masyarakat kurang berdaya atau powerless,

sehingga tidak mempunyai peluang untuk mengatur masa depannya sendiri. Hal itulah yang dianggap sebagai penyebab utama kondisi kehidupan tidak sejahtera.

Untuk memperoleh kewenangan dan kapasitas dalam mengelola pembangunan, masyarakat perlu di berdayakan melalui proses pemberdayaan atau empowerment. Dengan asumsi bahwa masyarakat tidak berdaya karena negara telah mengambil kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, maka untuk menambah power bagi masyarakat melalui pemberdayaan harus mengurangi power yang dimiliki oleh negara. Melalui proses pemberdayaan, negara harus memberi sebagian kewenangannya atau sebagian powernya kepada masyarakat.

Uraian di atas didasar oleh pandangan yang menganggap bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara total besaran power konstan atau sama, sehingga apabila salah satu komponen mendapat tambahan power komponen lain. Disamping pandangan tersebut, dalam menjelaskan proses pemberdayaan terdapat pula pandangan yang lain. Pandangan ini beranggapan bahwa dalam dinamika perkembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat terjadi bahwa masing-masing komponen mengalami peningkatan power. Konsekuensinya, untuk menambah power suatu komponen tidak selalu harus dilakukan dengan mengurangi power tersebut. Konsekuensi lainnya adalah bahwa besaran dari total power dalam kehidupan bermasyarakat secara kumulatif dapat bertambah sejalan dengan meningkatkan power masing-masing komponennya. Dalam pandangan hal ini usaha memperkuat yang lemah dapat dilakukan tanpa harus menghancurkan yang kuat. (Wrihatnolo dan Dwudjowijoto, 2007:118)

F. Konsep Pengertian Desa

1. pengertian Desa

Menurut Kamus Besar Indonesia Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau Kepala Desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja dibidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antar masyarakat terjalin kuat. Para masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.

Menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau tidak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem kenegaraan kesatuan

Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisasikan dan menetapkan kebutuhan masyarakat secara mandiri.

2. Pengertian Pemerintah desa

Pemerintahan diartikan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan prastruktur lainnya. Pemerintahan yang berisi lingkungan pekerjaan tetapi disebut juga pemerintahan dalam arti statis, dan dapat diartikan dalam arti dinamis, yang berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu penjabat (ambstrager). Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah.

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditunjukkan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usah-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lebih lanjut pemerintahan Desa berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa atau disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Afrizal (2015:31), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif, yaitu kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia. Penelitian tidak berupaya untuk mengkuantifikasikan (menghitung) data yang telah dikumpulkan, melainkan menginterpretasikannya atau menangkap apa yang terungkap dari data yang dikumpulkan.

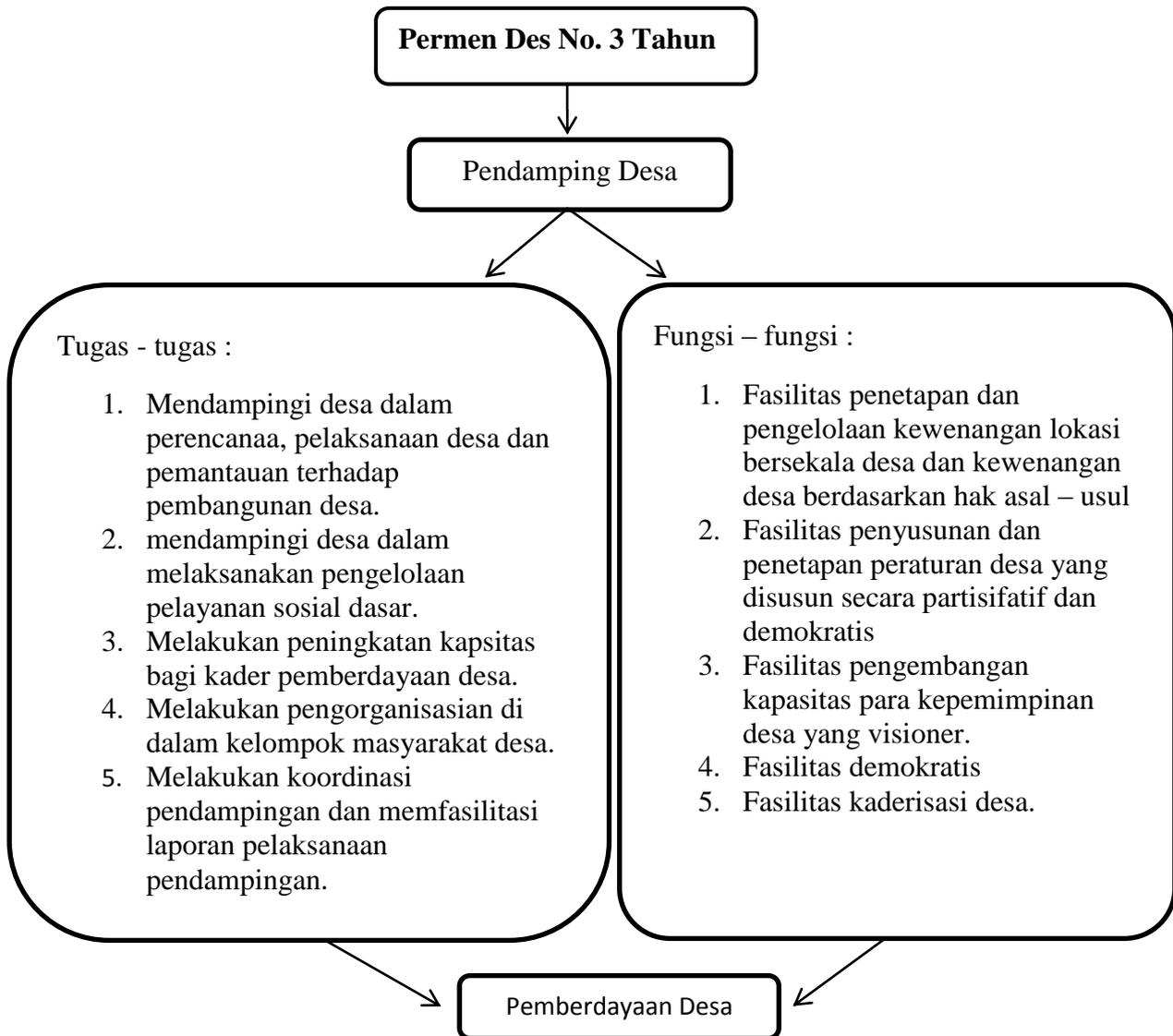
Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan apa yang terjadi saat ini di dalamnya terdapat upaya menceritakan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya yang terjadi di pada Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang.

B. Kerangka Konsep

konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pendampingan desa dalam meningkatkan pemberdayaan desa di desa tebing tanjung selamat kecamatan padang tualang.

Bagan 3.1

Kerangka Konsep



C. Definisi Konsep

Konsep adalah sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal-hal yang sejenisnya. Definisi konsep memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta

menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Efektivitas adalah usaha atau proses dalam mencapai suatu tujuan dan target sasaran yang hasilnya diharapkan dapat memenuhi dan memperhatikan kepentingan orang banyak dan dapat dirasakan manfaatnya bagi orang banyak.
2. Pendamping desa adalah sebuah jabatan dibawah kementerian desa. kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensis, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas desa.
3. Pemberdayaan desa adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu :

Tabel 3.1
Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi	Indikator
Pedampingan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Ikut serta dalam perencanaan pendampingan desa - Ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan pendampingan desa - Ikut serta dalam evaluasi pendampingan desa
Pemberdayaan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunkan angka kemiskinan - Meningkatkan kemandirian kelompok desa - Meningkatkan kualitas pelayanan

Adapun 3 Indikator dari kategorisasi pendampingan desa adalah sebagai berikut:

1. Ikut serta dalam perencanaan pendampingan desa adalah agar semua tahapan perencanaan pembangunan di desa dapat di minimalisir .
2. Ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan pendampingan desa membantu pemerintah daerah dalam hal sinergitas perencanaan pembangunan desa
3. Ikut serta dalam evaluasi pendampingan desa yang dilakukan agar pembangunan desa terlaksana sesuai dengan tepat sasaran, serta pembangunan dapat terlaksana secara efektivitas dan efisien.

Adapun 3 Indikator dari pemberdayaan desa adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kemiskinan
2. Meningkatkan kemandirian kelompok desa yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain didalam masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan agar mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan tujuan pelayanan.

E. Informan

Menurut Moloeng (2006:132), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian ini. Jadi, dia harus mempunyai banyak pengalaman latar penelitian. Informasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pendamping Desa
2. Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
3. Tokoh Pemuda
4. Tokoh Agama
5. Tokoh Masyarakat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber penelitian pada objek yang diteliti, untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait dan berhadapan langsung dengan informasi kunci yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui secara tepat mengenai gambaran yang terjadi dilokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undang lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan dan dokumentasi pada instansi terkait.

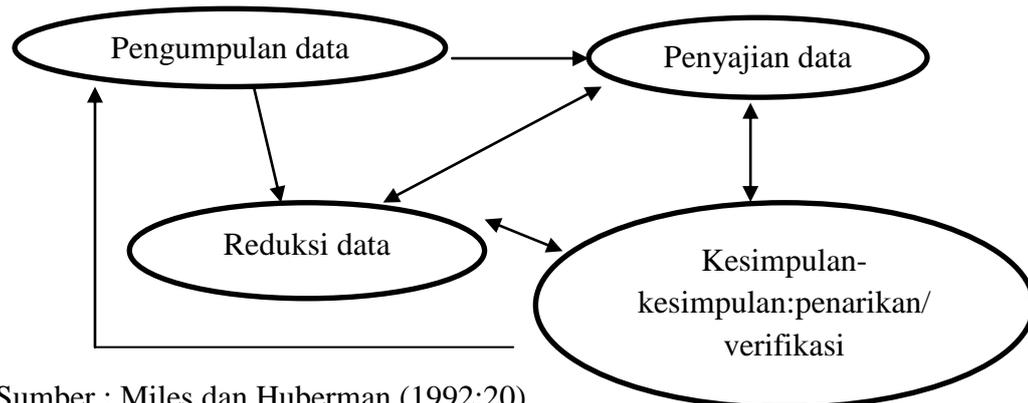
G. Teknik Analisis Data Kualitatif

Menurut Afrizal (2015:176), analisi data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan.

Teknik analisis yang digunakan data penelitian ini adalah teknik analisis Miles dan Huberman. Mereka membagi analisis data dalam penelitian kualitatif

ke dalam tiga tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Gambar 7.1



Sumber : Miles dan Huberman (1992:20)

H. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendampingan desa dalam pemberdayaan di Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang dan waktu penelitian mulai dari Januari 2018 samapi dengan Maret 2018.

1. Visi, Misi Desa Tebing Tanjung Selamat

a. Visi

Visi adalah cara pandang Pemerintah Desa Tebing Tanjung Selamat akan membawa masyarakatnya agar tetap eksis, antipatif, dan inovatif jauh kedepan.

Visi Desa Tebing Tanjung Selamat yang mengacu pada visi Kecamatan Padang Tualang dan Visi Kabupaten Langkat yaitu : **“Terwujudnya masyarakat Desa Tebing Tanjung Selamat yang lebih maju, bersih, sejahtera dan mandiri, berlandaskan aspek religius”**.

Adapun arti dari Visi Desa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Maju artinya yaitu dapat menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bersaing.
2. Bersih artinya yaitu bersih dari KKN dan masyarakat bebas dari pelanggaran hukum dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan bersih.
3. Sejahtera artinya yaitu meningkatkan taraf hidup manusia.
4. Mandiri artinya yaitu menjadikan Desa Tebing Tanjung Selamat yang tidak bergantung kepada pihak lain.
5. Berlandaskan aspek religius yaitu kehidupan masyarakat sehari-hari berlandaskan agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing masyarakat dan bersikap saling hormat menghormati.

b. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan visi yang ditetapkan.

Adapun misi Desa Tebing Tanjung Selamat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme birokrasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan sosial) yang berlandaskan iman dan takwa.
3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban.
4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur/sarana dan prasarana publik.
5. Meningkatkan kemampuan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.

Tujuan Pemerintah Desa Tebing Tanjung Selamat merupakan penjabaran dari pernyataan misi Pemerintah Desa bersama masyarakat. Tujuan adalah hasil

akhir yang harus dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 (Enam) Tahun. Oleh karena itu, tujuan yang dirumuskan sesuai misi Pembangunan Desa Tebing Tanjung Selamat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas (efisien dan efektivitas) kinerja/pelayanan aparaturnya Desa kepada masyarakat dan pemerintah;
2. Meningkatkan kreativitas dan kemampuan masyarakat;
3. Terciptanya Desa yang aman dan tertib;
4. Terciptanya ketersediaan sarana yang memadai;
5. Terciptanya masyarakat yang sejahtera dan makmur.;

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun, enam bulan, triwulan, atau hanya dalam jangka waktu satu bulan .

Sasaran meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja Pemerintah Desa. Keberadaan sasaran menjamin keberhasilan jangka panjang yang bersifat menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan stakeholders desa.

Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun sasaran dari pembangunan Desa sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem administrasi dan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat disegala bidang.
3. Mengembangkan keterampilan/skill masyarakat.

4. Terwujudnya keamanan dalam lingkungan dan ketertiban dalam pembangunan.
5. Bertambahnya sarana dan prasarana yang memadai.
6. Meningkatnya perekonomian masyarakat disegala bidang.
7. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam beraktivitas.

2. Legenda Desa Tebing Tanjung Selamat

Desa Tebing Tanjung Selamat terbentuk setelah kemenangan perjuangan Laskar Rakyat Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Lilur, Bapak Parijo, Bapak Sarijo, Bapak Kemun, Bapak Brahim dan Bapak Sentot yang membina masyarakat untuk bersatu menghimpun satu kesatuan. Tepat pada waktu itu di daerah Tanjung Selamat terdapat asrama Belanda.

Belanda kekurangan karyawan perkebunan, maka Belanda berinisiatif menjaring atau mencari karyawan karyawan dari kampung ke kampung dengan imbalan gaji dan kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu pihak perkebunan juga membuat lahan perumahan agar karyawan/buruh Indonesia tidak menggunakan lahan Hak Guna Usaha milik perusahaan. Oleh Bapak Lilur ditugaskan Bapak Kemas sebagai mata-mata untuk melemahkan Belanda. Dan pada saat kependudukan Jepang, Karyawan/buruh diberi lahan pertanian dan disahkan untuk masyarakat dan masyarakat membuat gubuk dilahan pertanian masing-masing.

Disebut Tebing Tanjung Selamat yang berarti Jurang Perjuangan sebagai tempat peperangan rakyat dengan Belanda yang lokasinya menebing dan menjorok ke sungai dan selamat dari arus sungai, maka disebutlah

kampung Tebing Tanjung Selamat yang terdiri dari lorong-lorong seperti Lorong Tebing Ujung, Lorong Tebing 1, Lorong Tebing Tengah, Lorong Tanjung 1, Lorong Tanjung 2. Dan sebagai Kepala kampung ditunjuklah Bapak Samiarjo sebagai Kepala Kampung yang Pertama pada tahun 1958 dengan nama Kampung Tebing Tanjung Selamat. Pada tahun 1963 Kampung Tebing Tanjung Selamat berganti nama menjadi Desa Tebing Tanjung Selamat. Pada tahun 1967 kembali lagi dengan nama Kampung Tebing Tanjung Selamat, dan pada tahun 1971 berganti nama lagi menjadi Desa Tebing Tanjung Selamat sampai saat sekarang ini.

3. Sejarah Desa Tebing Tanjung Selamat

Sejarah Desa Tebing Tanjung Selamat berupa kejadian baik dan buruk yang terjadi dari tahun 1945 sampai tahun 2016, seperti pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sejarah kejadian Baik dan Buruk

No	Tahun	Kejadian Baik	Kejadian Buruk
1	1945	Pengalihan Kekuasaan kepada NKRI	-
2	1958-1969	Panen Raya padi. Ditunjuk Bapak Samiarjo Sebagai Kepala Kampung Tebing Tanjung Selamat	Meninggalnya Bapak Samiarjo
3	1970-1978	Pemilihan Kepala Desa, dan terpilih Bapak Isman Jaya. Pembentukan Kelompok Tani Tunas Harapan yang diketuai oleh Bapak Kemino Kromo Harjo.	
4	1979-1980	Pemilihan Kepala Desa dan	

		terpilih Bapak Ngadiman, SP	
5	1985-1987	Pelaksana tugas Bapak Sujono Kasibin. Panen Raya Padi.	
6	1987-1995	Pemilihan Kepala Desa dan terpilih Bapak Rahman Acak. Alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan karet masyarakat.	Terjadi gagal panen (puso) karena banjir dan hama. Bayar hutang Kelompok Tani walaupun gagal panen kepada Bapak Harahap.
7	1996-2003	Pemilihan Kepala Desa dan terpilih Bapak Sutiran. Permohonan Masyarakat atas lahan atas pemberian Jepang yang dikuasai PTPN II. Permohonan Masyarakat atas lahan tidur yang dikuasai PTPN IV.	Terjadi banjir di Dsn. VI, Dsn. IX, Dusun XI, Dusun XII dan Dusun XIII. Tidak dikabulkan oleh PTPN II. Diberikan sebagai Pinjam Pakai saja.
8	2004-2010	Pemilihan Kepala Desa dan terpilih Bapak Sutiran.	Terjadi banjir di Dsn. VI, Dsn. IX, Dusun XI, Dusun XII dan Dusun XIII.
9	2010-2016	Pemilihan Kepala Desa dan terpilih Bapak Sukisno.	Terjadi banjir di Dsn. VI, Dsn. IX, Dusun XI, Dusun XII dan Dusun XIII. Pengambil alihan kembali lahan tidur yang dimohon petani. Harga karet turun, masyarakat terpaksa sangat mencengangkan ikat pinggang untuk kebutuhan sehari-hari.
10	2016	Pemilihan Kepala Desa dan terpilih Bapak Sukisno.	

Sumber: Kantor kepala Desa Tebing Tanjung Selamat

4. Geografis

Secara Geografis dan administratif Desa Tebing Tanjung Selamat merupakan salah satu dari 273 Desa di Kabupaten Langkat, dan Desa Tebing

Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang memiliki luas wilayah Luas \pm 2.040,4 ha, yang terbagi untuk Perumahan \pm 87 ha, Perkebunan BUMN \pm 1.474,7 ha, Perkebunan Rakyat \pm 450,7 ha, Lapangan, Sekolah, Mesjid, Kantor Desa, TPU, Jalan Umum/Dusun \pm 28 ha. Secara topografis terletak pada ketinggian 11 meter dari atas permukaan air laut.

Posisi Desa Tebing Tanjung Selamat berada pada bagian tengah Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan beberapa Desa se-Kecamatan Padang Tualang dan berbatasan dengan beberapa Kecamatan se-Kabupaten Langkat, yaitu :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tanjung Putus
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Batang Serangan
3. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Banjar Raya
4. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Sawit Seberang.

5. Kondisi Demografis

Adapun jumlah penduduk Desa Tebing Tanjung Selamat untuk Tahun 2016 berjumlah 7.518 jiwa yang terdiri dari 4.073 jiwa laki-laki dan 3.781 jiwa perempuan. Menurut etnis suku, masyarakat Desa Tebing Tanjung Selamat terdiri dari bermacam-macam suku, yaitu : Jawa 9.624/7321 orang, Melayu 21 orang, Batak/Karo/Mandailing 71 orang, Minang 8 orang, Cina 5 orang, Banjar 12 orang, Aceh 9 orang.

6. Mata Pencaharian Penduduk.

Tipe Desa Tebing Tanjung Selamat adalah Desa Perkebunan karena mayoritas mata pencaharian penduduk dari perkebunan baik perkebunan rakyat

maupun perkebunan BUMN sebagai buruh harian lepas maupun karyawan tetap, sebesar \pm 57%, dilihat dari tingkat penghasilan rata-rata masyarakat Desa Tebing Tanjung Selamat tergolong kedalam kategori Miskin. Desa Tebing Tanjung Selamat termasuk daerah dataran tinggi 11 M dari permukaan laut, bentuk Desa atau wilayahnya memanjang, dengan keadaan cuaca rata-rata 32°C dan curah hujan 6 bulan dalam 1 tahun.

Tabel 3.3

Mata Pencaharian Penduduk

Mata Pencaharian	2016	
	L	P
Petani	64	13
Buruh Tani	20	-
PNS	20	18
Pedagang Barang Kelontong	3	2
Nelayan	1	-
Montir	7	10
Perawat Swasta	-	6
Bidan Swasta	4	4
TNI	3	-
Polri	2	-
Pengusaha Kecil, Menengah, dan Besar	1	1
Guru Swasta	17	38
Pedagang Keliling	8	1

Pembantu Kadus	13	-
Karyawan Perusahaan Swasta	86	12
Karyawan Perusahaan Pemerintah	131	43
Wiraswasta	1.370	65
Belum Bekerja	532	460
Pelajar	1.105	1.006
Ibu Rumah Tangga	132	1.989
Purnawirawan/Pensiunan	122	22
Perangkat Desa	1	-
Buruh Harian Lepas	448	58
Pemilik Usaha Informasi dan komunikasi	1	-
Pemilik Warung, rumah makan, dan restoran	2	1
Supir	57	2
Tukang Kue	-	1
Tukang Sumur	1	-
Karyawan Honorer	3	6
Wartawan	1	-
Tukang Cukur	2	-
Tukang Las	4	-
Anggota Legislatif	1	-
Jumlah	4.162	3.758

Sumber: Kantor kepala Desa Tebing Tanjung Selamat

Komposisi penduduk Desa Tebing Tanjung Selamat berdasarkan jenis kelamin dan agama, dapat dilihat pada tabel 2.3. Dari segi Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penduduk Desa Tebing Tanjung Selamat dapat dikatakan hampir 100% beragama Islam, walaupun ada beberapa keluarga yang beragama lain. Sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Agama

No	Nama Dusun	Jenis Kelamin			Agama				
		Lk	Pr	Jumlah	Islam	Protes tan	Kathol ik	Hindu	Budh a
1	Dusun I Sumur Boor	492	499	991	987	4	-	-	-
2	Dusun II Teladan Rejo	370	345	715	715	-	-	-	-
3	Dusun III Teladan	285	266	551	550	1	-	-	-
4	Dusun IV Tambak Rejo	307	290	597	597	-	-	-	-
5	Dusun V Jati Mulyo	635	629	1264	1260	4	-	-	-
6	Dusun VI Bangun Murni	374	353	727	727	-	-	-	-
7	Dusun VII Jati Sari	140	116	256	256	-	-	-	-
8	Dusun VIII Wonosari	58	56	114	114	-	-	-	-
9	Dusun IX Benteng Sari	73	67	140	140	-	-	-	-
10	Dusun X RSTS	103	99	202	195	7	-	-	-

11	Dusun XI Tegal Rejo	292	269	561	540	21	-	-	-
12	Dusun XII Benteng Rejo	787	737	1524	1514	6	-	-	4
13	Dusun XIII Tanjung Mulyo	157	136	293	293	-	-	-	-
TOTAL		4.073	3.862	7.935	7.881	50	-	-	4

Sumber: Kantor kepala Desa Tebing Tanjung Selamat

Dalam kehidupan masyarakat Desa Tebing Tanjung Selamat masih kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup (lahir-dewasa/berumah tangga-mati), seperti upacara kelahiran, khitanan, perkawinan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian yang hampir selalu dilakukan oleh masyarakat.

Kegotong royongan, kebersamaan antara masyarakat Desa Tebing Tanjung Selamat sampai saat ini masih kuat, serta kebiasaan saling membantu juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan masyarakat dengan kondisi masyarakat yang majemuk sangat kuat.

Tabel 3.5

Jumlah penduduk Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan
Usia 0-5 Tahun	266	232
Usia 5-7 Tahun	138	156
Usia 7-13 Tahun	511	492
Usia 13-16 Tahun	258	200

Usia 16-19 Tahun	243	205
Usia 19-23 Tahun	297	228
Usia 23-30 Tahun	465	390
Usia 30-40 Tahun	644	650
Usia 40-56 Tahun	772	791
Usia 56-65 Tahun	328	332
65-75 Usia Tahun	111	124
Usia > 75 Tahun	40	62
Total	4.073	3.862

Sumber: Kantor kepala Desa Tebing Tanjung Selamat

7. Pendidikan

Sarana Pendidikan seperti PAUD/TK 9 (Sembilan) unit, MIS/MDA 3 (Tiga) unit, SD 3 (Tiga) unit, SLTP 1 (Satu) unit, dan SLTA 1 (Satu) unit. Dibidang olah raga Lapangan Sepak Bola 2 (Dua) unit, Lapangan Bulu Tangkis 9 (Sembilan) unit, LapanganVolly 5 (Lima) unit. Sarana Pelayanan Administrasi Pemerintahan/Kantor Kepala Desa 1 (Satu) unit.

Tabel 3.6

Data Pendidikan

Klasifikasi	2016	
	L	P
Belum Masuk TK/Kelompok Bermain (usia 0-5 tahun)	312	275
Sedang TK/Kelompok Bermain (usia 0-7 tahun)	117	138

Tidak Pernah Sekolah (usia 0->75 tahun)	21	54
Sedang SD/Sederajat (usia 0-22 tahun)	503	473
Tamat SD/Sederajat (usia 5->75 tahun)	776	1016
Tidak Tamat SD/Sederajat (usia 16->75 tahun)	52	109
Tamat SLTP/Sederajat (usia 7->75 tahun)	700	546
Sedang SLTP/Sederajat (usia 7-30 tahun)	230	180
Sedang SLTA/Sederajat (usia 13-56 tahun)	203	192
Tamat SLTA/Sederajat (usia 13-56 tahun)	784	702
Sedang D1(usia 23-56 tahun)	3	5
Tamat D1 (usia 19-56 tahun)	4	5
Sedang D2 (usia 7-30 tahun)	1	1
Tamat D2 (usia 40-75 tahun)	3	0
Sedang S1 (usia 7-56 tahun)	42	47
Tamat S1 (usia 19-65 tahun)	40	48
Sedang S2 (usia 30-65 tahun)	1	1
Tamat S2 (usia 30-56 tahun)	2	-
Tidak dapat membaca dan menulis latin/Arab (usia 16 - >75 tahun)	1	1
Tamat D3 (usia 16-65 tahun)	15	47
Total	4.073	3.082

Sumber: Kantor kepala Desa Tebing Tanjung Selamat

8. Sarana Peribadatan

Sarana Peribadatan seperti Masjid 12 (Dua Belas) unit dan Mushollah 4 (Empat) unit.

Tabel 3.7

Jumlah Masjid dan Mushalla

Klasifikasi	Lokasi	Jumlah
Masjid	Dusun I Sumur Boor	1
Masjid	Dusun II Teladan Rejo	1
Masjid	Dusun III Teladan	1
Masjid	Dusun IV Tambak Rejo	1
Mushalla	Dusun IV Tambak Rejo	1
Masjid	Dusun V Jati Mulyo	1
Masjid	Dusun VI Bangun Murni	1
Masjid	Dusun VII Jati Sari	1
Masjid	Dusun IX Benteng Sari	1
Mushalla	Dusun IX Benteng Sari	2
Masjid	Dusun X RSTS	1
Masjid	Dusun XI Tegal Rejo	1
Mushalla	Dusun XI Tegal Rejo	1
Masjid	Dusun XII Benteng Rejo	1
Masjid	Dusun XIII Tanjung Mulyo	1

Sumber: Kantor kepala Desa Tebing Tanjung Selamat

9. Susunan Organisasi Tata Kelola (STOK) Desa

Keadaan Pemerintahan Desa Tebing Tanjung Selamat, bentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tebing Tanjung Selamat sebagai berikut :

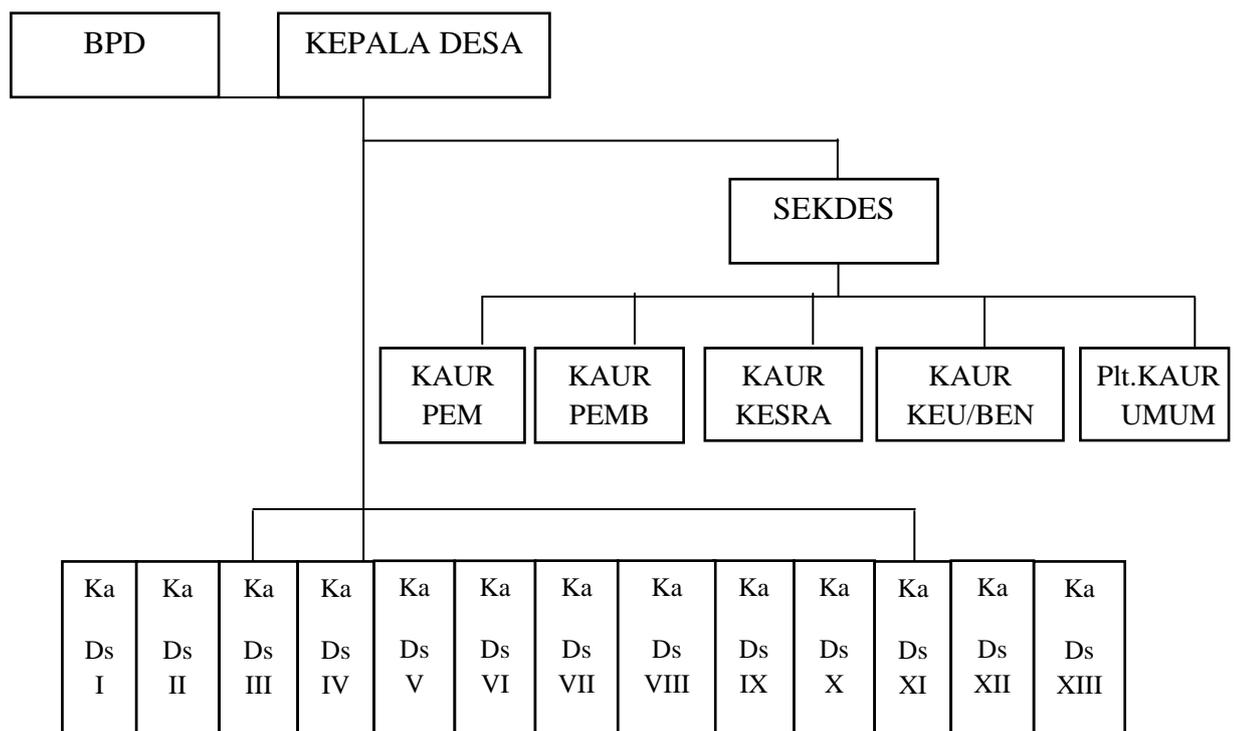
- Kepala Desa : SUKISNO
- Sekretaris Desa : PAIRIN
- Kepala Urusan Pemerintahan : RUBIYEM
- Kepala Urusan Pembangunan : PURNAWARMAN
- Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial : DARMAYANTI
- Kepala Urusan Keu./Bend. Desa : SRI FATMAWATI,
S.Kom
- Plt. Kepala Urusan Umum : DENI AL RASYID
- Kadus I Sumur Boor : SUMINO
- Kadus II Teladan Rejo : MULIADI
- Kadus III Teladan : JHON PRIONO
- Kadus IV Tambak Rejo : MISNO
- Kadus V Jati Mulyo : TUGIMIN
- Kadus VI BangunMurni : SUDIARMAN
- Kadus VII Jati Sari : GUNANTO
- Kadus VIII Wonosari : SUGITO
- Kadus IX Benteng Sari : YUSINPERMONO
- Kadus X RSTS : SYARIFUDDIN
- Kadus XI Tegal Rejo : SURIONO
- Kadus XII Benteng Rejo : AGLIS
- Kadus XIII Tanjung Mulyo : SUDARTO

- Ketua Badan Permusyawaratan Desa : RUSLI
- Ka. LPMD : SURIP. B

Kepala Desa bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya kepada BPD, dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat tentang laporan dibidang Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta Keuangan.

Bagan 3.2

Struktur Organisasi Pemerintah Desa



1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berikut adalah uraian dari struktur organisasi Pemerintahan Desa Tebing Tanjung Selamat:

a) Tugas Pemerintahan Desa

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 2) Mengajukan rencana peraturan desa
- 3) Menetapkan peraturan desa
- 4) Mengajukan rencana APBDes
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 6) Membina perekonomian desa
- 7) Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif dan swadaya masyarakat
- 8) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 9) Ketentraman dan ketertiban
- 10) Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra pemerintahan desa
- 11) Pengembangan pendapatan desa dan sebagainya

b) Kepala Desa mempunyai tugas:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan
- 3) Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

Kepala Desa mempunyai wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD

- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Desa (perdes)
- 3) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk di bahas dan di tetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa
- 6) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- 7) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara ketuhanan Negara Republik Indonesia
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa
- 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- 8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik

- 9) Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat desa
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- 15) Mengembangkan potensi dan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- 16) Membuat laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati
- 17) Memberi laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD
- 18) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat
- 19) Membuat laporan akhir tahun masa jabatan kepada bupati Perangkat desa mempunyai tugas sebagai berikut:

c) Sekretaris Desa

Membantu Kepala Desa melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat desa yang bersangkutan. Adapun tugas pokok dan fungsi sekretaris desa adalah sebagai berikut:

a) Tugas Sekretaris Desa

- 1) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 2) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
- 3) Pelaksanaan administratif umum
- 4) Pelaksanaan administratif pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 5) Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja, pelaksanaan tugas sekretariat
- 6) Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
- 7) Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
- 8) Menyusun dan memproses Rancangan Produk Hukum Desa (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa)
- 9) Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian (Aparatur Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
- 10) Menyelenggarakan Penyusunan Rencana Anggaran Pengelolaan Keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya
- 11) Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
- 12) Menyusun program tahunan desa (RPJMDes-RKPDDes)

13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa, dalam hal kepala desa berhalangan

d) Tugas Kaur Pemerintahan

Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa, sedangkan tugas pokok dan fungsi kaur pemerintahan sebagai berikut :

- 1) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan Pemerintahan Desa.
- 2) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 3) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan Kegiatan Sosial Politik Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa.
- 4) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa.
- 5) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan pemerintahan Desa.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan.
- 7) Merumuskan upaya terciptanya ketentraman, ketertiban dan pembangunan kesatuan bangsa di desa.
- 8) Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi social kemasyarakatan dan adat istiadat.

- 9) Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dusun
- 10) Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- 11) Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sehat dan dinamis
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

e) Tugas Kaur Umum :

Tugas pokok Kaur Umum adalah “membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa. Adapun fungsi Kaur Umum diantaranya :

- 1) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa.
- 2) Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan.
- 3) Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa.
- 4) Melaksanakan urusan rumah tangga desa.
- 5) Melaksanakan penataan rapat dan upacara.
- 6) Melaksanakan penataan arsip.
- 7) Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan Pemerintahan Desa.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

f) Tugas Kaur Keuangan:

Tugas pokok Kaur Keuangan adalah “ membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, perencanaan dan penyelenggaraan Program Desa” tugas pokok dan fungsi keuangan desa sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.
- 2) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
- 3) Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai
- 5) dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa.
- 7) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan.

g) Tugas Kaur Pembangunan:

Tugas pokok kaur pembangunan “ membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan pembangunan di desa” adapun fungsi kaur pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan desa
- 2) Mendorong dan menggairahkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat desa
- 3) Menyelenggarakan mekanisme perencanaan musyawarah pembangunan desa
- 4) Mendorong kegiatan perkoperasian, perdagangan, dunia usaha dan keterampilan rakyat

- 5) Melakukan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan kelompok tani
- 6) dan ternak, pkk dan organisasi profesi
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

h) Tugas Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra):

- 1) Mengumpulkan dan mengevaluasi data dibidang kesejahteraan rakyat.
- 2) Melakukan pembinaan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, psyandu dan pendidikan masyarakat
- 3) Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas naripadana
- 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang keajahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dsb)
- 5) Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana
- 6) Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan sosial lainnya
- 7) Membantu administrasi dibidang nikah, talak, cerai, rujuk, kelahiran serta pengurusan jenazah atau kematian
- 8) Melaksanakan administrasi desa
- 9) Melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dibidangnya
- 10) Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi dan pendapatan lainnya)
- 11) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan sekretaris desa

i) Tugas Kepala Kampung:

Kepala Kampung mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjalankan tugas, kepala kampung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya
- 2) Membantu Kepala Desa dalam kegiatan penyuluhan, pembinaan dan kerukunan warga di wilayah kerjanya
- 3) Melaksanakan keputusan dari kebijaksanaan kepala desa di wilayah kerjanya
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

j) Tugas Pokok Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Tugas Pengelola Kegiatan (TPK) berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan pembangunan di desa, TPK terdiri dari ketua sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pengelolaan administrasi serta keuangan program.

Sekretaris dan bendahara membantu ketua TPK terutama dalam masalah administrasi dan keuangan jika memang diperlukan. TPK dapat menambah tenaga atau anggota sesuai bidang kegiatan yang diperlukan. Tambahan anggota atau

tenaga dapat dipilih pada saat musyawarah desa dari informasi hasil musyawarah antar desa penempatan usulan.

Tugas dan tanggung jawab TPK:

- 1) Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam hal pembuatan rencana kerja detail dan rencana pembangunan dana untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan
- 2) Penyiapan dokumen administrasi sesuai ketentuan pada buku PTO dan penjelasannya
- 3) Pembuatan rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan
- 4) Memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari masyarakat desa yang diutamakan
- 5) Pemeriksaan hasil kerja dan penerimaan bahan kemudian mengajukan sertifikat untuk mendapat persetujuan dari kepala desa
- 6) Pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan
- 7) Pembuatan laporan bulanan
- 8) Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggung jawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa Perdesaan melalui pertemuan musyawarah desa
- 9) Membuat dan menandatangani surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (SP3K) bersama PJOK

- 10) Membuat rencana operasional dan pemeliharaan asset hasil kegiatan Dana Desa
- 11) Menyelenggarakan yang diperlukan termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan
- 12) Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desa dan menempelkan data di papan informasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskriptif dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana efektivitas pendampingan desa dalam meningkatkan pemberdayaan desa di desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang. Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis yaitu: pertama, peneliti diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 9 orang informan penelitian yang terdiri atas 1 orang pendamping desa, 1 orang BPD, 1 orang tokoh agama, 1 orang tokoh pemuda dan 5 orang masyarakat.

Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Februari 2018 di kantor desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang, wawancara dilakukan guna memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pertanyaan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Sedangkan data sekunder didapatkan dari foto yang diambil pada lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan selama kurang waktu selama kurang lebih dua minggu.

B. Hasil Penelitian

Wawancara adalah proses yang tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang di wawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam perakteknya ada beberapa jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yan sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode-metode wawancara dengan informasi peneliti. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan di dalam penelitian. Sebelum melakukan wawancara terhadap narasumber, penulis mengamati keadaan dan situasi yang ada pada Kantor Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang. Adapun daftra pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang teguh diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:s

1. Pendamping Desa

a. Perencanaan Pendampingan Desa

Pendampingan desa adalah seseorang yang berupaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Eko Prayogo, S.pd sebagai pendamping desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang mengenai apa tujuan dari pendampingan desa yang ada di desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang dan diperoleh hasil sebagai berikut:

“ Menurut saya dengan adanya tujuan pendampingan desa ini cukup membantu dalam segala hal termaksud dalam pekerjaan pemerintah desa dan saya sebagai pendamping cukup membantu proses berjalannya pemabangunan dan mengajari bagaimana cara megelola tata kelola desa dengan baik”.

(Hasil wawancara pada hari Senin 05 Februari 2018 dengan Bapak Eko Prayoga pukul 09:00 WIB).

Dengan demikian dapat bawah pelaksanaan yang dijalankan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik.

Dalam proses pendampingan desa masyarakat merupakan objek penting yang harus diperhatiakn. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui pandangan masyarakat mengenai pendampingan desa di desa Tebing Tanjung Selamat dan peneliti mewawancarai Bapak Mislan, beliau memberi pendapat mengenai tujuan dari perencanaan pendampingan desa yaitu:

“ Pemerintah menurunkan pendamping desa untuk membantu kami dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka dari itu direncanakan adanya pedamping desa dalam membantu tata kelola desa tersebut”.

(Hasil wawancara pada hari Senin 07 Februari 2018 dengan Bapak Mislan pukul 10:00 WIB).

Lalu peneliti bertanya lagi dengan salah seorang tokoh pemudah yang bernama Muhammad Tuah Suheri,S.T beliau mengatakan bahwa:

“ Menurut saya agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan desa hal ini merupakan tujuan dari perencanaan pendampingan desa”.

(Hasil wawancara pada hari Selasa 06 Februari 2018 dengan Bapak Muhammad Tuah Suheri, S.T pukul 11:00 WIB).

Selanjutnya saya kembali bertanya kepada Bapak Eka Prayoga selaku pendamping desa di desa Tebing Tanjung selamat mengenai hambatan-hambatan dalam perencanaan pendampingan desa beliau mengatakan bahwa:

“ Menurut saya tidak ada hambatan karena kerja pendamping desa terhadap masyarakat dengan pemerintah cukup baik”.

(Hasil wawancara pada hari Senin 05 Februari 2015 dengan Bapak Eka Prayoga pukul 09:30 WIB).

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Mislan mengenai hambatan-hambatan dalam perencanaan pendampingan desa yaitu:

“ Jawaban yang singkat dari bapak mislan beliau mengatakan dalam pendampingan desa tidak ada mengalami hambatan karena semua berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada”.

(Hasil wawancara pada hari Senin 07 Februari 2018 dengan Bapak Mislan pukul 11:00 WIB).

Hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil wawancara sebelumnya yang dilakukan kepada bapak Mislan hasil wawancara kali ini yang dilakukan kepada Bapak Muhammad Tuah Suheri,S.T beliau mengatakan bahwa:

“Ada hambatan, karena banyaknya program yang direncanakan tidak terlaksana dengan baik”.

(Hasil wawancara pada hari Selasa 06 Februari 2018 dengan Bapak Muhammad Tuah Suheri pukul 12:00 WIB).

Persepsi masyarakat mengenai respon dan daya tanggap yang diberikan oleh pendamping desa tentu beranekah ragam, hal penting yang perlu diperhatikan adalah dalam setiap proses perencanaan pendampingan desa harus sesuai dengan strandat prosedur agar pelaksanaan setiap progaram yang dilaksanakan dapat

berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Dodi Purnawan, S.pd mengenai ada atau tidaknya permasalahan dalam proses pendampingan desa beliau mengatakan bahwa:

“ Tidak ada satu permasalahan yang di besar besarkan, masalah yang terkecil yaitu seperti masalah oprasional”.
(Hasil wawancara pada hari Selasa 08 Februari 2018 dengan Bapak Dodi Purnawan, S.pd pukul 13:00 WIB).

Senada dengan hasil wawancara diatas diperoleh hasil wawancara dengan Bapak Odi Agam selaku tokoh masyarakat, beliau menjawab yaitu:

“ Kalau menurut saya tidak ada permasalahan karena terlihat dari banyaknya pembangunan yang berjalan di desa ini”.
(Hasil wawancara pada hari Selasa 10 Februari 2018 dengan Bapak Odi Agam pukul 13:00 WIB).

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada Bapak Sunarwan dan mendapatkan hasil yang sama pula beliau mengatakan bahwa:

“ Tidak ada, dalam pelaksanaan sesuai dengan aturan dan ketentuan di desa tersebut”.
(Hasil wawancara pada hari Selasa 11 Februari 2018 dengan Bapak Sunarwan pukul 11:00 WIB).

Dalam proses perencanaan pendampingan desa masyarakat merupakan objek penting yang harus diperhatikan masyarakat sebagai objek ada perencanaan pendampingan desa harus diberikan peran yang maksimal dan berkesinambungan agar tercipta kepuasan pada diri masyarakat tersebut.

b. Pengawasan, pelaksanaa pedampingan desa

Dalam pelaksanaanya, perencanaan pendampingan desa harus dapat diterima dan dapat memberikan hasil kepada masyarakat. dalam pengawasan pelaksanaan pendampingan desa membantu pemerintah daerah dalam hal sinargitas perencanaan pembangunan desa. Untuk itu peneliti melakukan

wawancara dengan Bapak Eka Prayoga sebagai pedamping desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang mengenai bagaimana pengawasan dan pelaksanaan pendamping desa?

“ Menurut saya dalam sistem pengawasan pada umumnya semua masyarakat bisa mengawasi, maka dari itu dalam pelaksanaan pengawasannya ada tersendiri pengawasan untuk pedamping ”.

(Hasil wawancara pada hari Selasa 05 Februari 2018 dengan Bapak Eka Prayoga pukul 11:00 WIB).

Lalu penelitian melakukan wawancara dengan Bapak Mislan mengenai pengawasan dan pelaksanaan pendamping desa dan diperoleh hasil sebagai berikut:

“ Menurut saya dalam pelaksanaan dan pengawasan cukup baik mereka turun kelapangan, mereka mengawasi pembangunan fisik, dan mereka mengawasi administrasi laporannya”.

(Hasil wawancara pada hari Selasa 07 Februari 2018 dengan Bapak Mislan pukul 10:11 WIB).

Beberda dengan Bapak mislan hasil wawancara diatas, maka dengan hasil wawancara Bapak Muhammad Tuah Suheri, S.T mengatakan bahwa:

“ Menurut saya dalam dalam pengawasan dan pelaksanaan program melibatakn masyarakat itu sendiri ”.

(Hasil wawancara pada hari Selasa 06 Februari 2018 dengan Bapak Muhammad Tuah Suheri, S.T pukul 11:11 WIB).

Dalam perencanaan pedampingan desa kerap kali di temukan kendala ataupun kritikan yang muncul dari masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendapat hasil wawancara yang berbeda dengan hasil wawancara pada Bapak Eka Prayoga selaku pedamping desa yang mengatakan bahwa:

“ Menurut saya kendala yang cukup serius yaitu pada biaya oprasional karena tingkat antar desa ke desa lain cukup jauh

sehingga pada saat mereka menjalankan aktivitas mereka dialapanagn terkendala”.

(Hasil wawancara pada hari Selasa 05 Februari 2018 dengan Bapak Eka Prayoga pukul 13:00 WIB).

Senada dengan penelitian diatas, peneliti melakukan dengan Bapak Muhammad

Tuah Suheri, S.T selaku beliau mengatakan bahwa:

“ Menurut saya ada kendalanya pada saat pembuatan-pembuatan perencanaan pembangunan mereka tidak masyarakat tidak ikut serta”.

(Hasil wawancara pada hari Selasa 06 Februari 2018 dengan Bapak Muhammad Tuah Suheri, S.T pukul 12:11 WIB).

Perencanaan pendampingan desa adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan setiap program yang akan dijalankan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Selanjutnya peneliti bertanya kembali dengan Bapak Mislan selaku mengenai ada atau tidaknya kendala dalam pelaksanaan pendampingan desa yaitu:

“ Menurut saya sejauh ini mereka mengikuti peraturan yan ada dan mereka tidak perna mengalami kendala, tapi kendala interenya Cuma pada faktor cuaca atau lokasi desa ke des lain yang ingin ditempuh cukup jauh”.

(Hasil wawancara pada hari Selasa 07 Februari 2018 dengan Bapak Mislan pukul 13:11 WIB).

Kemudian saya bertanya lagi kepada kepada Bapak Susyanto selaku tokoh masyarakat mengenai kedala dalam pelaksanaan pendampingan desa yaitu:

“Menurut saya banyak, banyaknya perencanaan yang dibuat oleh masyarakat tetapi tidak sesuai anggaran dana desa”.

(Hasil wawancara pada hari Selasa 08 Februari 2018 dengan Bapak Susyanto pukul 11:11 WIB).

Perencanaan pendampingan desa juga melibatkan masyarakat karena masyarakat juga berperan penting dalam setiap pelaksanaan program yang telah

direncanakan yang tidak lain bertujuan untuk dapat mengontrol setiap perkembangan program yang sedang berjalan di desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang. Untuk itu peneliti mewawancarai Bapak Eka Prayoga selaku pendamping desa mengenai apakah pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan pendampingan desa, beliau mengatakan bahwa:

“ Menurut saya dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat iya jelas..... karena masyarakat disini berhak mengawasi, karena pengawasan ini mutlak hak masyarakat”.
(Hasil wawancara pada hari Selasa 05 Februari 2018 dengan Bapak Eka Prayoga pukul 08:00 WIB).

Senada dengan hasil wawancara diatas Bapak Mislan mengatakan bahwa apakah pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan pendampingan desa yaitu:

“ Menurut saya iya 100%, pemerintah memberikan hak kepada masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan tersebut”.
(Hasil wawancara pada hari Selasa 07 Februari 2018 dengan Bapak Mislan pukul 09:11 WIB).

Kemudian saya bertanya kembali kepada Bapak Muhammad Tuah Suheri beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya iya, agar masyarakat mengetahui program apa saja yang sedang dijalankan”.
(Hasil wawancara pada hari Selasa 06 Februari 2018 dengan Bapak Muhammad Tuah Suheri, S.T pukul 13:11 WIB).

Berikutnya saya bertanya juga kepada Bapak Dodi Purnawan,S.pd beliau mengatakan bahwa:

“ Menurut saya dalam pengawasan pada umumnya yang lebih berhak mengawasi adalah masyarakat itu sendiri”.

(Hasil wawancara pada hari Selasa 08 Februari 2018 dengan Bapak Dodi Purnawan,S.pd pukul 13:30 WIB).

Selanjutnya saya bertanya lagi kepada Bapak Sunarwan beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya pengawasan pendampingan cukup memuaskan karena mereka mengawasi kita dengan tata perencanaan, dengan evaluasi, dan dengan mereka turun kelapangan dan mereka mencoba memberikan masukan jadi pengawasan mereka cukup membantu kita dan menyelesaikan tugas-tugas”.

(Hasil wawancara pada hari Selasa 11 Februari 2018 dengan Bapak Sunarwan pukul 11:30 WIB).

Terakhir saya bertanya kepada Bapak Odi Agam beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya sudah berjalan dengna baik karena pendamping desa melibatkan kami masyarakat uikut berpartisipasi”.

(Hasil wawancara pada hari Selasa 10 Februari 2018 dengan Bapak Odi Agam pukul 13:00 WIB).

c. Evaluasi Pendampingan

Dalam evaluasi pendampingan desa yang dilakukan agar pembangunan desa terlaksana sesuai dengan tepat sasaran, serta pembangunan dapat terlaksana secara efektivitas dan efesien. Dengan demikian pemerintah harus fokus meningkatkan mutu evaluasi pendampingan desa. Namun dengan adanya pedampingan desa masyarakat lebih terarah. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Eka Prayoga sebagai pedamping desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang mengenai evaluasi yang ada di desa Tebing Tanjung Selamat?

“ Menurut saya sejauh ini pedamping cukup bekerja eksistensi dan loyalitas mereka bekerja sesuai dengan

tuppoksi mereka dan untuk evaluasi pekerjaan kami mereka sangat membantu dalam membuat laporan”.

(Hasil wawancara pada hari Selasa 05 Februari 2018 dengan Bapak Eka Prayoga pukul 14:00 WIB).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lagi kepada Bapak Mislan mengenai evaluasi pendampingan yang ada didesa Tebing Tanjung Selamat yaitu:

“Menurut saya dari awal mereka selalu mengevaluasi, mereka koordinasi ke pemerintah untuk mengevaluasi perencanaan yang mereka buat dengan hasil yang maksimal mungkin”.

(Hasil wawancara pada hari Selasa 07 Februari 2018 dengan Bapak Mislan pukul 12:11 WIB).

Senada dengan hasil wawancara diatas Bapak Eka Prayoga dengan Bapak Muhammad Tuah Suher,S.T mengatakan bahwa:

“ Saya kira evaluasi pendampingan desa yang ada di desa Tebing Tanjung Selamat sudah dijalankan dengan baik”.

(Hasil wawancara pada hari Selasa 06 Februari 2018 dengan Bapak Eka Prayoga pukul 13:30 WIB).

Evaluasi pendampingan haruslah mempermudah masyarakat. Dalam hal ini evaluasi pendampingan yang dilakukan agar pembangunan desa terlaksana sesuai dengan tepat sasaran. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Eka Prayoga mengenai apakah manfaat dari pedampingan desa tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya disini dengan adanya pedamping mereka mengadakan evaluasi sebelum pkerjaan kita selesai 100%, dan kita sudah tahu dimana adanya kekurangan. Jadi manfaatnya disini perkerjaan kita terbantu dengan tidak pengerjaan dua kai, dan mereka cukup memberikan sesuatu yang baik dengan tidak mengulainginya dua kali”.

(Hasil wawancara pada hari Selasa 05 Februari 2018 dengan Bapak Eka Prayoga pukul 14:30 WIB).

Lalu penelitian melakukan wawancara dengan Bapak Mislan mengenai manfaat evaluasi pendampingan desa beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya manfaat dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui kesalahan-kesalahan mereka dari ini sehingga nantinya tidak terulang kembali”.
(Hasil wawancara pada hari Selasa 07 Februari 2018 dengan Bapak Mislan pukul 12:11 WIB).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Tuah Suheri mengenai manfaat dari pendampingan desa beliau mengatakan bahwa:

“ Menurut saya manfaat dalam pendampingan desa untuk menjadi tolak ukur dalam pembangunan fisik”.
(Hasil wawancara pada hari Selasa 06 Februari 2018 dengan Bapak Muhammad Tuah Suheri, S.T pukul 14:30 WIB).

Senada dengan yang atas dengan Bapak Eka Prayoga, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Dodi Purnawan, S.Pd mengatakan bahwa:

“ Menurut saya dengan manfaat evaluasi ini adalah sangat membantu pekerjaan kita dengan tidak pengerjaan dua kali dan kita cukup memberikan sesuatu yang baik dengan tidak mengulang-ulang pekerjaan”.
(Hasil wawancara pada hari Selasa 08 Februari 2018 dengan Bapak Dodi Purnawan pukul 11:30 WIB).

Lalu penelitian melakukan wawancara dengan Bapak Sunarwan yang mengatakan bahwa:

“ Menurut saya Pelaksanaan dari program kerja desa dapat terwujud dan dikerjakan secara maksimal sehingga terbentuknya kesejahteraan masyarakat”.
(Hasil wawancara pada hari Selasa 11 Februari 2018 dengan Bapak Sunarwan pukul 11:30 WIB).

Dalam evaluasi pedampingan desa kerap kali di temukan kendala yang muncul dari masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendapat hasil wawancara yang pada Bapak Mislan beliau mengatakan bahwa:

“ Menurut saya disaat berkoordinasi kelapangan mereka melakuakn evaluasi tidak didampingi dengna pihak pemerintah, jadi evaluasi mereka tadi kurang dan alhamdulillah semua dapat terselesaikan dengan baik”.
(Hasil wawancara pada hari Selasa 07 Februari 2018 dengan Bapak Mislan pukul 14:11 WIB).

Berbeda pula hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Tuah Suheri beliau mengatakan bahwa:

“ Menurut saya dalam melakukan evaluasi iya pasti ada kendala karena selama kegiatan berlangsung ada sebagian masyarakat yang mengeluh tentang program yang dijalankan”.
(Hasil wawancara pada hari Selasa 06 Februari 2018 dengan Bapak Muhammad Tuah Suheri, S.T pukul 13:30 WIB).

Senada dengan yang diatas peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dodi Purnawan,S.pd beliau mengatakan bahwa:

“ Menurut saya sejauh ini tidak ada kendala yang terjadi karena kerja sama pemerintah dengan pendamping desa cukup baik sehingga semuanya berjalan dengan lancar”.
(Hasil wawancara pada hari Selasa 08 Februari 2018 dengan Bapak Dodi Purnawan pukul 12:30 WIB).

2. Pembedayaan Desa

a. Menurunkan angka kemiskinan

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemudian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan desa juga merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang

mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari perangka kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dengan adanya pendampingan desa diharapkan agar dapat menanggulangi garis kemiskinan yang ada di desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Purnawarman selaku kepala urusan pembangunan mengenai adanya pendampingan desa dapat menurunkan angka kemiskinan beliau mengatakan bahwa:

“ Menurut saya dengan dikirimnya pendamping dari pemerintah kedesa-desa sangat membantu menurunkan angka kemiskinan contohnya seperti membuka usaha didesa tersebut sehingga terbukalah lapangan kerja dan secara otomatis tingkat perekonomian mereka naik setingkat dengan naiknya setingkat otomatis kemiskinan bisa terangkat”.
(Hasil wawancara pada hari Senin 12 Februari 2018 dengan Bapak Purnawarman pukul 09:30 WIB).

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai apa peran dari pendampingan desa untuk menurunkan angka kemiskinan, beliau mengatakan bahwa:

“Saya akan konsep suatu kegiatan yang memang bisa mengangkat desa itu dengan bagaimana caranya membangun satu usaha yang ada didesa itu supaya terbentulah lapangan pekerjaan”.
(Hasil wawancara pada hari Senin 12 Februari 2018 dengan Bapak Purnawarman pukul 10:00 WIB).

Selain itu peneliti juga bertanya mengenai bentuk pembangunan seperti apa yang baik untuk pengentasan kemiskinan beliau menjawab yaitu:

“Menurut saya pembangunan infrastruktur ekonomi dan kita bangun satu usaha atau peluang yang memang masyarakat itu bisa merasakan keuntungan secara ekonomi”.
(Hasil wawancara pada hari Senin 12 Februari 2018 dengan Bapak Purnawarman pukul 11:00 WIB).

Peran serta masyarakat dalam menyukseskan program-program dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu harapan dari pemerintah. Respon dari masyarakat baik pro maupun kontra bukan hanya dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberdayaan desa atas program menurunkan angka kemiskinan namun juga dapat dilihat dari dukungan pemerintah maupun perangkat desa. Setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah kerap kali menghadapi permasalahan dan hambatan baik pro maupun kontra yang sedikit banyak mengganggu jalannya program perencanaan pendampingan desa tersebut.

b. Meningkatkan Kemandirian Kelompok

Meningkatkan kemandirian kelompok desa yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain didalam masyarakat. Wawancara kali ini dilakukan dengan Bapak Purnawarman mengenai meningkatkan kemandirian kelompok desa beliau mengatakan bahwa:

“ Dalam meningkatkan kemandirian kelompok biasanya adanya pembinaan, pelatihan, kesempatan dan yang terpenting adalah pembiayaan karena dalam melakukan pembinaan dan pelatihan pasti menggunakan biaya”
(Hasil wawancara pada hari Rabu 13 Februari 2018 dengan Bapak Purnawarman pukul 09:00 WIB).

Berikutnya peneliti bertanya kembali kepada Bapak Purnawarman mengenai hambatan-hambatan dalam meningkatkan kemandirian kelompok desa beliau mengatakan bahwa:

“ Menurut saya andai kata pendamping dan pemerintah tidak bisa kerja sama untuk membantu kelompok ini maka kelompok ini tidak akan berkembang seperti kelompok lainnya”.

(Hasil wawancara pada hari Rabu 13 Februari 2018 dengan Bapak Purnawarman pukul 10:00 WIB).

Pertanyaan berikutnya mengenai apakah kegiatan pendampingan desa dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan kemandirian kelompok desa beliau mengatakan bahwa:

“ Menurut saya meningkatkan kemandirian kelompok desa sangat memberikan pengaruh positif, karena disaat kelompok mempunyai pedamping sesuatu hal yang bernilai negatif akan dilarikan kepositif”.

(Hasil wawancara pada hari Rabu 13 Februari 2018 dengan Bapak Purnawarman pukul 10:30 WIB).

c. Meningkatkan kualitas pelayanan

Masyarakat menuntut agar mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan tujuan pelayanan. Selain itu dalam pelaksanaan program pendampingan desa diharapkan mampu melibatkan lapisan masyarakat yang memang masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam program yang akan berjalan untuk itu peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Purnawarman mengenai adanya pendampingan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang ada didesa Tebing Tanjung Selamat beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya dengan adanya pedamping desa disini cukup membantu termasuk dalam pelayanan masyarakatnya”.

(Hasil wawancara pada hari Rabu 13 Februari 2018 dengan Bapak Purnawarman pukul 11:30 WIB).

Berikutnya masih kepada Bapak yang sama dengan pertanyaan yang berbeda mengenai bagaimana respon pendampingan desa dalam melayani masyarakat beliau mengatakan bahwa:

“ Menurut saya dalam melayani masyarakat pada umumnya untuk pelayanan masyarakat yang ada di desa Tebing Tanjung Selamat cukup terlayani dan kalau untuk pendamping cukup mendampingi kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita”.

(Hasil wawancara pada hari Rabu 13 Februari 2018 dengan Bapak Purnawarman pukul 13:30 WIB).

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada Bapak Purnawarman mengenai apakah pelayanan pendampingan desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya pada dasarnya yang melayani masyarakat adalah pemerintah desa itu sendiri, pendamping desa sifatnya hanya membantu dan selalu ada saat kami butuh kan”.

(Hasil wawancara pada hari Rabu 13 Februari 2018 dengan Bapak Purnawarman pukul 14:30 WIT).

C. Pembahasan

Bila kembali pada inti pengertian pendampingan desa yaitu terjadinya proses kreatif yang oleh masyarakat sendiri, jelas menunjukkan adanya proses inisiatif dan bentuk tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, tanpa adanya intervensi dari luar.

Demikian Tujuan pendamping desa dalam peraturan pasal 2 meliputi: (a) meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa: (b) meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif: (c) meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor dan mengoptimalkan aset lokasi desa secara emansipatoris.

Dengan adanya tujuan dari pendamping desa ini diharapkan setiap masyarakat desa khususnya di Desa Tebing Tanjung Selamat dapat memahami

arti penting dengan adanya pendamping desa untuk meningkatkan pemberdayaan desa daya tawar dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan masyarakat desa sehingga program dan kegiatan pembangunan mampu dikelola masyarakat desa itu sendiri.

Dalam undang-undang nomor 3 tahun 2015 tentang tuga pedampingan desa pasal 11 menegaskan bahwa pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarkat desa.

Selanjutnya spada pasal 12 ditegaskan bahawa pedamping desa mlaksanaksan tugas mendampingi desa, meliputi: a) medampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemebrdayaan masyrakat desa; (b) mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekomoni desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa dan pemberdayaan masyrakat desa; (c) melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembagunana dan pmberdayaan masyarakat desa; (d) melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelomopok masyarakat desa; (e) melakuakan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru; (f) mendampingi desa dalam pemabangunan kawasan perdesaan secara partisipasi; (g) melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi lapora pelaksanaan pedampingan oleh camat kepada pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Menurut Undang-undang No 4 Tahun 2014 tentang desa kegiatan pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui eksistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

Pedampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan.

Sedangkan tujuan pendampingan desa menurut permendes RI No 3 Tahun 2015, pasal 2 meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif
- c. Meningkatkan sinergi program pembanguan desa antar sektor
- d. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris

Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengajak serta dan membimbing masyarakat (individu atau kelompok) untuk mengembangkan berbagi potensi yang dimilikinya, agar mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Program pendampingan ini membnatukan ketersediaan sumber daya manusia memiliki intergritas dan kualitas, yang mampu berperan sebagai

fasilitator, komunikator dan dinamisator, serta berperan sebagai konsultan tempat bertanya bagi kelompok.

Disisi lain, dilihat dari unsur utamanya pemberdayaan bersisi kewenangan dan kemampuan, pemberdayaan berisi kewenangan dan kemampuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena walaupun sudah memperoleh kewenangan, akan tetapi apabila masyarakat belum atau tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan dan melaksanakan kewenangan tersebut maka pemberdayaan belum terwujud. Dengan perkataan lain masyarakat membutuhkan kemampuan untuk dapat mengaktualisasikan kewenangan yang dimiliki. Sebagai suatu contoh, walaupun masyarakat memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dan merencanakan pembangunannya secara mandiri, apabila masyarakat belum atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan pembangunan maka kewenangan yang dimiliki tidak memiliki makna. Dilihat dari ini, maka ketidakberdayaan masyarakat dapat dimaknai dari tiadanya atau minimnya kewenangan dan kemampuan.

Dalam bangunan kerangka pikir pemberdayaan masyarakat desa, penerapan Undang-undang desa ini harus dikawal oleh pendamping desa yang bertugas mengajarkan aturan legal kepada masyarakat desa. Pendampingan dan pelatihan dari pendamping desa kepada masyarakat desa ini diharapkan mempercepat proses internalisasi Undang-undang desa sebagai sebuah proses pembiasaan sosial dalam diri masyarakat desa. Selain itu, pendamping desa juga bertugas mendampingi warga desa meningkatkan daya tawar dalam mengakses sumberdaya yang dibutuhkan rakyat desa sehingga program dan kegiatan

pembangunan mampu dikelola masyarakat desa itu sendiri. Kerja pendampingan desa difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat desa melalui proses belajar sosial dengan demikian, pendampingan desa tidak dibebani dengan tugas-tugas pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan desa yang berdasarkan Undang-undang desa sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah desa.

Diperoleh dari salah satu informan penelitian beliau mengatakan bahwa kendala dalam pelaksanaan pendampingan desa untuk menjalankan salah satu program yaitu pada biaya operasional karena tingkat antar desa ke desa lain itu cukup jauh pada saat mereka menjalankan aktifitas mereka dilapangan.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis ekonomi, politik, sosial budaya dan ketahanan keamanan.

Diperoleh informai tentang hambatan dan keluhan yang muncul dari masyarakat dan terlihat jelas bahwa masyarakat masih ada yang kurang puas dari hasil kinerja pendampingan desa, tetapi tidak sedikit pula yang merasa puas terhadap hasil kerja pendampingan desa di Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang, hal itu terbukti dari salah seorang yang peneliti tanya mereka menjawab “cukup lumayan bagus dengan adanya kegiatan pemberdayaan karena dapat mengembangkan potensi ataupun keahlian masyarakat di desa ini”. Dari hasil penelitian dilapangan saya sendiri sebagai peneliti sudah melihat bagaimana hasil dari pedampingan desa disana salah satu hasil kinerjanya sudah berjalan cukup baik, hal ini terlihat dari adanya pembangunan paving block.

Dengan adanya pembangunan paving block ini memudahkan masyarakat di dalam berbagai aktivitas, paving block ini sendiri merupakan salah satu program usulan dari pendamping desa yang secara tidak langsung ada melibatkan masyarakat, mengapa sebagian besar masih ada masyarakat yang tidak puas dengan hasil kinerja ataupun tidak mengerti apa itu pendampingan desa? Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisai terhadap sebagian besar masyarakat di Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penelitian yang dilakukan oleh penreeliti tentang Efektivitas pendampingan desa dalam meningkatkan pemberdayaan desa didesa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang, maka penulis membuat kesimpulan. Pendampingan desa didesa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang sudah menjalankan tugasnya dengan baik dikarenakan dengan adanya pendamping desa yang sifatnya mendampingi warga desa dan memberikan pengarahan kepada masyarakat dan mengaskes sumberdaya yang dibutuhkan rakyat desa sehingga program dan kegiatan pembangunan mampu dikelola masyarakat desa. membantu dalam pembanguan maka dari itu masyarakat yang ikut serta dalam berpartisipasi walaupun hanya sebagian saja. Dengan adanya pendamping desa didesa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. sangat membantu pemerintah desa dalam tata kelola desa dari yang tidak tahu menjadi tahu dan meningkatkan pemberdayaan desa dalam mengaskes sumber daya yang dibutuh kan masyarakat desa.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil temuan diatas, maka yang menjadi sasaran dalam penelitian adalah:

1. Diharapkan supaya mengefektifkan tenaga pendamping desa dalam menjalankan tugasnya ditengah masyarakat sebagai sosok yang ahli dan memiliki kemampuan untuk membimbing masyarakat dalam pembangunan.
2. Diharapkan lebih bisa aktif lagi dalam memberikan usulan prioritas pembangunan yang objektif tanpa ada kepentingan tertentu, serta masyarakat dalam pembangunan harus aktif menentukan arah pembangunan yang efektif untuk kepentingan bersama.
3. Diharapkan kepada masyarakat yang kurang berpartisipasi supaya lebih meningkatkan partisipasinya lagi sehingga pembangunan secara cepat serta efektif dan efisien.
4. Hubungan baik kerjasama antara pemerintah desa, pendamping desa, lembaga-lembaga terkait dan juga masyarakat agar dipertahankan kinerja sehingga kedepannya dapat lebih baik lagi dan hasil yang didapat juga lebih maksimal.

Daftar Pustaka

- Abdurahmat, 2008. *Efektivitas Organisasi Edisi Pertama*, Jakarta: Airlangga
- Afrizal, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* : Jakarta : Rajawali Pres
- Dra. Risyanti, Drs. H. Roesmidi, m.m. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat Sumedang*
- Maria Eni Surasih. *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga,2006),hlm.23
- Mathis dan Jackson . 2001 . *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT.Salemba Empat
- Moleng, Lexy. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaj Karya
- S.P.Siagian, Sondong P. 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Siagian 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Mengahdapi Abad ke 21*, Jilid 2, Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakakn Rakyat : Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung : Rafika Aditama

Waluyo, 2007. *Manajemen Publik* : Mandar Maju

Wrihantnolo. Dan Rianti Nugroho Dwicjowitojo, 2007, *Manajemen Pemberdayaan*, Elex Media Komputida, Jakarta

Widjaja. HAW (2003:169) : *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta : PT. Raja Grofindo Persada.

Undang-Undang :

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pengertian Desa

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS

Nama : Tasya Anggraini
 Tempat/Tanggal Lahir : Rakyat Rejo,07 Juni 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Beteng Rakyat Rejo
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Agama : Islam
 Warga Negara : Indonesia
 Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara

2. NAMA ORANG TUA

Ayah : Noto Kuswoyo
 Ibu : Yandrayani
 Alamat : Rakyat Rejo Kecamatan Padang Tualang
 Kabupaten Langkat

3. PENDIDIKAN

1. Tahun 2002-2008 : SD Beteng Rakyat Rejo
2. Tahun 2008-2011 : SMP SWASTA YAPEKSI Sawit Seberang
3. Tahun 2011-2014 : SMA SWASTA YPP Sawit Seberang
4. Terdaftar sebagai mahasiswa IAN FISIP UMSU Tahun Akademik 2014/2018

Demikianlah riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Maret 2018

Tasya Anggraini

DAFTAR WAWANCARA
PENDAMPING DESA

Nama :

Usia :

Agama / suku :

Pendidikan :

Lama bekerja :

1. Pendampingan Desa

A. Perencanaan pendampingan desa

1. Menurut bapak/ibu apa tujuan dari perencanaan pendampingan desa?

Jawab :

2. Menurut bapak/ibu apakah ada hambatan-hambatan dalam perencanaan pendampingan desa?

Jawab :

3. Menurut bapak/ibu bagaimana langkah-langkah dalam melakukan pendampingan desa?

Jawab :

B. Pengawasan, pelaksanaan pendampingan desa

1. Bagaimana pengawasan dan pelaksanaan pendampingan desa?

Jawab :

2. Apakah pemerintahan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan pendampingan desa?

Jawab :

3. Menurut bapak/ibu apakah ada kendala dalam pelaksanaan pendampingan desa?

Jawab :

C. Evaluasi pendampingan desa

1. Menurut bapak/ibu bagaimana evaluasi pendampingan yang ada didesa tebing tanjung selamat?

Jawab :

2. Menurut bapak/ibu apa manfaat dari evaluasi pendampingan desa?

Jawab :

3. Menurut bapak/ibu dalam melakukan evaluasi apakah ada kendala selama kegiatan pendampingan desa berlangsung?

Jawab :

DAFTAR WAWANCARA
PEMERINTAH DESA

Nama :

Usia :

Agama / suku :

Pendidikan :

Lama bekerja :

1. Pemerintah Desa

A. Menurunkan angka kemiskinan

1. Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya pendampingan desa dapat menurunkan angka kemiskinan?

Jawab :

2. Apa peran bapak/ibu dalam pendampingan desa untuk menurunkan angka kemiskinan?

Jawab :

3. Menurut bapak/ibu kira-kira bentuk pembangunan seperti apa yang baik untuk pengetasan kemiskinan?

Jawab :

B. Meningkatkan kemandirian kelompok

1. Apa saja jenis kegiatan dalam meningkatkan kemandirian kelompok desa?

Jawab :

2. Menurut bapak/ibu apa hambatan-hambatan dalam meningkatkan kemandirian kelompok desa?

Jawab :

3. Apakah kegiatan pendampingan desa dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan kemandirian kelompok desa?

Jawab :

C. Meningkatkan kualitas pelayanan

1. Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya pendampingan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di desa tebing tanjung selamat?

Jawab :

2. Menurut bapak/ibu bagaimana respon pendampingan desa dalam melayani masyarakat?

Jawab :

3. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan pendampingan desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat?

Jawab :

DAFTAR WAWANCARA

TOKOH AGAMA

Nama :

Usia :

Agama / suku :

Pendidikan :

Lama bekerja :

1. Tokoh Agama

A. Perencanaan pendampingan desa

1. Menurut bapak/ibu apa tujuan dari perencanaan pendampingan desa?

Jawab :

2. Menurut bapak/ibu apakah ada hambatan-hambatan dalam perencanaan pendampingan desa?

Jawab :

3. Menurut bapak/ibu bagaimana langkah-langkah dalam melakukan pendampingan desa?

Jawab :

B. Pengawasan, pelaksanaan pendampingan desa

1. Bagaimana pengawasan dan pelaksanaan pendampingan desa?

Jawab :

2. Apakah pemerintahan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan pendampingan desa?

Jawab :

3. Menurut bapak/ibu apakah ada kendala dalam pelaksanaan pendampingan desa?

Jawab :

C. Evaluasi pendampingan desa

1. Menurut bapak/ibu bagaimana evaluasi pendampingan yang ada didesa tebing tanjung selamat?

Jawab :

2. Menurut bapak/ibu apa manfaat dari evaluasi pendampingan desa?

Jawab :

3. Menurut bapak/ibu dalam melakukan evaluasi apakah ada kendala selama kegiatan pendampingan desa berlangsung?

Jawab :

DAFTAR WAWANCARA

TOKOH PEMUDA

Nama :

Usia :

Agama / suku :

Pendidikan :

Lama bekerja :

1. Tokoh Pemuda

A. Perencanaan pendampingan desa

1. Menurut bapak/ibu apa tujuan dari perencanaan pendampingan desa?

Jawab :

2. Menurut bapak/ibu apakah ada hambatan-hambatan dalam perencanaan pendampingan desa?

Jawab :

3. Menurut bapak/ibu bagaimana langkah-langkah dalam melakukan pendampingan desa?

Jawab :

B. Pengawasan, pelaksanaan pendampingan desa

1. Bagaimana pengawasan dan pelaksanaan pendampingan desa?

Jawab :

2. Apakah pemerintahan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan pendampingan desa?

Jawab :

3. Menurut bapak/ibu apakah ada kendala dalam pelaksanaan pendampingan desa?

Jawab :

C. Evaluasi pendampingan desa

1. Menurut bapak/ibu bagaimana evaluasi pendampingan yang ada didesa tebing tanjung selamat?

Jawab :

2. Menurut bapak/ibu apa manfaat dari evaluasi pendampingan desa?

Jawab :

3. Menurut bapak/ibu dalam melakukan evaluasi apakah ada kendala selama kegiatan pendampingan desa berlangsung?

Jawab :

DAFTAR WAWANCARA
TOKOH MASYARAKAT

Nama :

Usia :

Agama / suku :

Pendidikan :

Lama bekerja :

1. Tokoh Masyarakat

A. Perencanaan pendampingan desa

1. Apakah ada permasalahan dalam proses pendampingan desa?

Jawab :

2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap hasil kerja pendamping desa?

Jawab :

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan?

Jawab :

B. Pengawasan, pelaksanaan pendampingan desa

1. Apakah pemerintahan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan pendampingan desa?

Jawab :

2. Menurut bapak/ibu apakah ada kendala dalam pelaksanaan pendampingan desa?

Jawab :

3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pendamping desa?

Jawab :

C. Evaluasi pendampingan desa

1. Menurut bapak/ibu apa tujuan evaluasi ini?

Jawab :

2. Menurut bapak/ibu apa manfaat dari evaluasi pendampingan desa?

Jawab :

3. Menurut bapak/ibu dalam melakukan evaluasi apakah ada kendala selama kegiatan pendampingan desa berlangsung?

Jawab :



PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FISIP UMSU

Medan, 13 NOVEMBER 2017

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : TASYA ANGGRAINI
N P M : 4031000417
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Tabungan sks : 130 sks, IP Kumulatif 3,35

menyampaikan permohonan persetujuan judul skripsi :

Judul yang diusulkan	Persetujuan
EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN DESA DI DESA TEBING TANJUNG SELAMAT KECAMATAN PADANG TUALANG	
PERAN PERANGKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI DESA TEBING TANJUNG SELAMAT KECAMATAN PADANG TUALANG	
EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN KELUARGA PEDESAAN DI SAWIT SEBERANG	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
- Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
dikembalikan kepada Dekan untuk
ditentukan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

(TASYA ANGGRAINI)

Medan, tgl. 13 NOVEMBER 2017.

002

Ketua,

(ULI KHAIRIAH, S.P., M.Pd...)

Pembimbing : Mulyati Dhan, S.S
M.Pd

Lampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Terpercaya
 agar disebutkan

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
 Nomor : 082 /SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2017

Rekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal 13 November 2017 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : TASYA ANGGRAINI
 N P M : 1403100047
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2017/2018
 Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN DESA DI DESA TEBING TANJUNG SELAMAT KECAMATAN PADANG TUALANG.**

Pembimbing : Mujahiddin S.Sos., M.SP.

Sehingga demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Muharram 1437 H / 26 Oktober 2015 M.

Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal 13 November 2018.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 02 Rabiul Awal 1439 H
 21 November 2017M

Dekan



Drs. Tasrif Syam., M.Si

Penyusunan :
 Ketua P.s. Ilmu Administrasi Negara
 Pembimbing ybs. Di Medan;
 Bertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

**PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Yth.
 Dekan FISIP UMSU

Medan, 28 DESEMBER 2017.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU :

Nama lengkap : TASYA ANGGRAINI
 N P M : 403100047
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

ajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 082./SK/II.3/UMSU-03/F/2017.. tanggal 28 DESEMBER 2017 dengan judul sebagai berikut :

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN
 DESA DI DESA TEBING TANJUNG SELAMAT KECAMATAN
 PADANG TUALANG

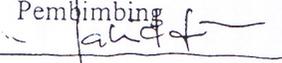
ma permohonan ini saya lampirkan :

- Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
- Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
- DKAM yang telah disahkan;
- Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
- Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
- Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
- Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)
- Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

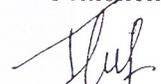
Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing


 (.....)

Pemohon,



(TASYA ANGGRAINI.....)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 349/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2017

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Hari, Tanggal : Sabtu, 30 Desember 2017
W a k t u : 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat : LAB. FISIP UMSU
Pemimpin Seminar : Nailil Khairah, S.IP, M.Pd

No	Nama Mahasiswa/Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal/Skripsi
21	FANSURI	1403100027	1 MOHD. YUSRI, Dr, M.Si	1 DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DALAM RANGKA MENOPTIMALKAN ASET KAMPUNG DI DESA SUMBER MUKTI KECAMATAN KUTA BAHARU KABUPATEN ACEH SINGKIL
22	DESY ANGGRAINI	1403100047	1 ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.Pd	1 MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN DESA DI DESA TEBING TANJUNG SELAMAT KECAMATAN PADANG TUALANG
23	DESY RAHMAYANTI MARUNDURI	1403100181	1 NAILIL KHAIRAH, S.IP, M.Pd	1 DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENTERIAN AGAMA NO 16 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALITAS GURU AGAMA DI MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA H.MUHAMMAD HEFNI TANJUNG MORAWA
24	DESY ASTRIA SIPAYUNG	1403100142	1 ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.Pd	1 NAILIL KHAIRAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA MABAR KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN DELI SERDANG
25	ASRI FAHRIZAL	1403100090	1 ARIFIN SALEH, Dr, M.SP	1 DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	EFEKTIVITAS SOSIALISASI PILKADA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DI KPUD KOTA MEDAN

Medan, 11 Rabul Akhir 1439 H
30 Desember 2017 M





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

nama lengkap : Tasya Anggraini
NIM : 1403100047
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara (Pembangunan)
Judul Skripsi : Efektivitas Pendampingan Desa dalam meningkatkan PEMBERDAYAAN desa di desa Tebing Tanjung selamat Kec. Padang Tualang

Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
01/12/2017	Bimbingan pemersu latar belakang masalah	
13/12/2017	Bimbingan penulisan Bab Uraian teoritis	
24/12/2017	Bimbingan penulisan bab Metodologi	
23/01/2018	ABC Seminar proposal	
04/01/2018	Bimbingan pasca seminar proposal	
16/02/2018	Bimbingan pemersu Draft awal wawancara	
21/02/2018	Bimbingan pemersu hasil penulisan (Bab II)	
06/03/2018	Bimbingan penulisan pembatal hasil penulisan (Bab II)	
09/03/2018	Bimbingan pemersu Keterampilan dan Saran (Bab V)	
03/03/18	ACC sidang meja hijau	

Medan, 13 Maret 2018

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke I

(ADHANIL)

(MILIL KHATIRAH, S.IP, M.Pd)

(Muzakir)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 082/ KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2018
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 29 Rabiul Akhir 1439 H
16 Januari 2018 M

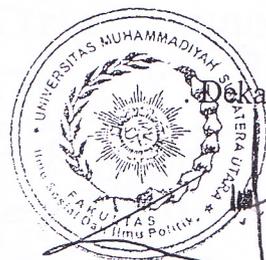
Kepada : Yth, Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat
Kecamatan Padang Tualang
di –
Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak / Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **TASYA ANGGRAINI**
N P M : 1403100047
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2017 / 2018
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN DESA DI
DESA TEBING TANJUNG SELAMAT
KECAMATAN PADANG TUALANG.**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Drs. TASRIF SYAM, M.Si.

**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN PADANG TUALANG
DESA TEBING TANJUNG SELAMAT**

Jl. Bt. Serangan – Simp. Psr VI - Kode Pos 20852

Tebing Tanjung Selamat, 05 Februari 2018

: 412.6-123/TTS/II/2018

:
: -
: Izin Penelitian

Kepada Yth
Bapak Dekan
Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Di _____
Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 082/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2018 perihal Izin Penelitian Mahasiswa.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TASYA ANGGRAINI
N P M : 1403100047
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2017/2018

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian di Kantor Desa Tebing Tanjung Selamat sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

***“EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBERDAYAAN DESA DI DESA TEBING TANJUNG SELAMAT”***

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA TEBING TANJUNG SELAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KEPALA DESA
TEB. TJ. SELAMAT
SUKISNO
KEC. PD. TUALANG

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 407/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2018

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018
 Waktu : 08,00 s.d. Selesai
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
		PENGUJUI I	PENGUJUI II	PEMBIMBING	
DESY ASTRIA SIPAYUNG	1403100142	Drs. BANGUN NAPTUPULLU, M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA MABAR KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN DELI SERDANG
EMALIA BR TAMBA	1403100145	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	R. KUSNADI, Drs, M.AP	PELAKSANAAN SISTEM APLIKASI PERIZINAN SERI DELI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG
YOGI UTAMI	1403100035	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	Dr. ARIFIN SALEH., M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA SIAGA DI DESA SELANG BENARA KABUPATEN BENER MERIAH
IRHAM ABDULLAH POHANG	1403100114	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM RANGKA PROFESIONALISME PEMERINTAHAN DESA DI DESA PERUMNAS SIMALINGKAR KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG
TASYA ANGGRAINI	1403100047	NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN DESA DI DESA TEBING TANJUNG SELAMAT KECAMATAN PADANG TUALANG

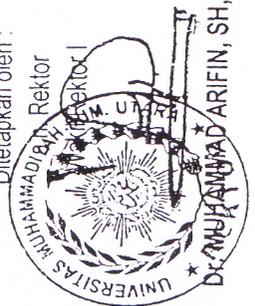
Disidang:

Medan, 03 Rajab 1439 H

20 Maret 2018 M

Ditetapkan oleh :

Rektor



Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,

Dr. RUDHANTO, M.Si



Panitia Ujian

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kcm